

DUAPULUH TAHUN KONFLIK POSO, SULAWESI TENGAH: RERADIKALISASI, REKONSILIASI, DAN UPAYA-UPAYA BINADAMAI

Ringkasan Eksekutif	2
I. Pendahuluan	3
II. Selintas tentang Konflik Poso	6
1. Konflik Komunal Muslim-Kristen (1998-2001).....	6
2. Periode Teror Sporadis (2002-2007)	8
3. Poso pasca-Penegakan Hukum (2007-Sekarang): Tumbuh dan Kiprah MIT.....	10
III. Reradikalisasi Masyarakat Poso?	11
1. Kondisi Poso yang makin Aman	11
2. Trauma terhadap Konflik Masa lalu	12
3. Dukungan para Ikhwan terhadap Pemilu.....	13
4. Deradikalisasi atau “Disengagement”?	16
5. Peran Perempuan dalam Mencegah Reradikalisasi	17
IV. Sisa Dukungan kepada MIT: Rekonsiliasi yang belum Penuh	19
1. Sisa-sisa Dukungan Ideologis kepada Kelompok Teroris MIT	19
2. Kelompok-kelompok Rentan lain di Poso: Anak-anak Muda dan Perempuan.....	20
3. Reintegrasi: Masalah Bantuan Ekonomi	23
4. “Gangguan” Akibat Isu-isu Nasional dan Internasional.....	26
V. Langkah-langkah Binadamai.....	27
1. Langkah-langkah Pemolisian	27
2. Pengarusutamaan Model Pendidikan yang Terbuka.....	29
3. Aktivisme Binadamai Lintas-Iman.....	31
4. Keterlibatan Kaum Perempuan.....	33
VI. Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi.....	34
Bibliografi	40
Apendiks I.....	42
Apendiks II.....	43

DUAPULUH TAHUN KONFLIK POSO, SULAWESI TENGAH: RERADIKALISASI, REKONSILIASI, DAN UPAYA-UPAYA BINADAMAI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Transisi demokrasi di Indonesia pada 1998 diiringi oleh terjadinya konflik kekerasan di antara kelompok agama/etnis di tempat-tempat seperti Ambon, Maluku Utara, Kalimantan, dan Poso. Namun, berbeda dari konflik-konflik kekerasan di tempat-tempat lain, konflik kekerasan di Poso, Sulawesi Tengah, masih berlangsung hingga sekarang, dua puluh tahun sesudah konflik itu pertama kali meletus. Menjelang pergantian tahun 2018 lalu, misalnya, masyarakat Poso dikejutkan oleh penemuan jasad korban mutilasi oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Riset ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait perkembangan di atas. Sementara banyak orang, termasuk masyarakat Poso, menyatakan bahwa konflik kekerasan di daerah itu sudah selesai, mengapa aksi-aksi kekerasan masih terus terjadi meskipun beberapa operasi keamanan sudah dilakukan untuk menghentikannya? Jika dulu konflik kekerasan bermula sebagai konflik komunal di antara komunitas Muslim dan Kristen, mengapa belakangan konflik itu berubah menjadi serangan satu pihak oleh kelompok-kelompok Muslim tertentu kepada target-target Kristen tertentu atau wakil-wakil pemerintah tertentu seperti Polri? Apakah ada kaitan antara aksi-aksi kekerasan terakhir oleh kelompok teroris MIT dengan peristiwa kekerasan komunal yang bermula dua dekade lalu? Jika ada, di mana letaknya dan mengapa upaya-upaya perdamaian yang sudah dilakukan selama ini belum mendatangkan hasil yang maksimal?

Riset ini menggarisbawahi tiga temuan utama. *Pertama*, aksi-aksi teroris kelompok MIT bukan merupakan bukti bahwa masyarakat Poso kini mengalami reradikalisasi. Masyarakat Poso pada umumnya kini sudah berpandangan bahwa situasi sekarang sangat

berbeda dibanding dulu dan bahwa kini tidak ada lagi alasan ideologis atau politis untuk mendukung kelompok-kelompok seperti MIT. Mereka juga berpendapat bahwa konflik komunal yang pernah terjadi hanya mendatangkan kerugian kepada semua pihak, Muslim maupun Kristen. Para ikhwan dan jihadis Poso, yang dulu menjadi pilar aksi-aksi kekerasan, juga memiliki pandangan yang sama.

Kedua, meski dukungan masyarakat kepada kelompok MIT kini hampir tidak ada, rekonsiliasi di antara mereka belum berlangsung penuh. Kedamaian yang kini makin dirasakan masyarakat Poso masih rentan diganggu oleh sisa-sisa pengaruh ideologi garis keras, yang bersifat eksklusif dan membenarkan aksi-aksi kekerasan, yang masih mungkin mempengaruhi segmen-segmen tertentu masyarakat. Kedamaian mereka itu juga terus diganggu masih bertahannya dukungan kepada kelompok MIT oleh pihak-pihak di luar Poso, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ketiga, langkah-langkah penguatan infrastruktur binadamai sudah berlangsung cukup baik di Poso, seperti tampak dalam sektor-sektor keamanan, pendidikan, dan sosial-budaya. Langkah-langkah di atas dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah, khususnya Polri yang makin mendahulukan sisi pencegahan dari tumbuhnya ekstremisme kekerasan, para pemimpin agama yang makin mengarusutamakan pendidikan terbuka dan moderat, dan para aktivis muda di bidang perdamaian dan lintas-agama yang makin rajin membangun jembatan di antara kedua komunitas agama dominan di Poso. Sayangnya, langkah-langkah itu masih kurang memperoleh dukungan seperti yang seharusnya diterima.

Jakarta, Mei 2019

DUAPULUH TAHUN KONFLIK POSO, SULAWESI TENGAH: RERADIKALISASI, REKONSILIASI, DAN UPAYA-UPAYA BINADAMAI

Ihsan Ali-Fauzi • Siswo Mulyartono • Dyah Ayu Kartika

I. PENDAHULUAN

Menjelang pergantian tahun lalu, 30 Desember 2018, warga Desa Salubose di Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Mautong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah, dikejutkan penemuan jasad korban mutilasi oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Esoknya, ketika petugas dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hendak mengevakuasi korban, mereka ditembaki kelompok yang sama, dan dua anggota Polri mengalami luka-luka. Kontak senjata lalu terjadi di antara petugas Polri dan kelompok di atas, hingga kelompok terakhir melarikan diri ke pegunungan di perbatasan Parimo dan Poso. Hingga kini, pengejaran terhadap kelompok MIT itu masih terus berlanjut dalam Operasi Tinombala, yang sebenarnya sudah dimulai sejak 10 Januari 2016.

Insiden kekerasan di atas dan akibat-akibat turunannya menunjukkan bahwa konflik kekerasan di Poso masih terus menyisakan masalah, meskipun konflik itu sudah dimulai sekitar 20 tahun lalu, bersamaan dengan terjadinya Reformasi di Indonesia pada 1998. Berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Parimo, Poso adalah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di pesisir Teluk Tomini dan yang sekaligus menjadi jalur strategis penghubung antar-provinsi di Pulau Sulawesi.¹ Ali Kalora kini memimpin MIT, sesudah pemimpin sebelumnya sekaligus pendirinya, Santoso alias Abu Wardah, mati tertembak dalam Operasi Tinombala pada 18 Juli 2016, dan penggantinya yang pertama, Basri atau Bagong, tertangkap dalam operasi yang sama pada 13 September 2016.

¹ Kabupaten Poso membentang dari tepi laut ke pegunungan dan dilewati Sungai Poso yang mengalir dari Danau Poso di Tentena, Kecamatan Pamona Puselemba. Sebelum konflik kekerasan pecah pada 1998, Poso antara lain terkenal berkat Festival Danau Poso yang diadakan setiap tahun dan diikuti oleh wisatawan lokal, nasional, bahkan internasional.

Insiden di atas juga mengundang tanda tanya: Sementara banyak orang, termasuk masyarakat Poso, menyatakan bahwa konflik kekerasan sudah selesai, mengapa aksi-aksi kekerasan masih terus mengganggu dan sejumlah operasi keamanan dilakukan untuk menghentikannya? Jika dulu konflik kekerasan bermula sebagai konflik komunal di antara komunitas Muslim dan Kristen, yang jumlahnya relatif seimbang, mengapa belakangan konflik itu berubah menjadi serangan satu pihak oleh kelompok-kelompok Muslim tertentu kepada target-target Kristen tertentu atau wakil-wakil pemerintah yang dianggap kafir seperti anggota Polri? Apakah ada kaitan antara aksi-aksi kekerasan terakhir oleh kelompok teroris MIT dengan peristiwa kekerasan komunal yang bermula dua dekade lalu? Jika ada, di mana letaknya dan mengapa upaya-upaya perdamaian yang sudah dilakukan selama ini belum mendatangkan hasil yang maksimal?

Laporan ini disusun berdasarkan riset yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, yang sengaja kami bingkai dalam kerangka besar apakah masyarakat Poso sedang mengalami “reradikalisasi” atau justru sebaliknya, sudah mengalami “rekonsiliasi”. Dalam maknanya yang longgar, yang dimaksud reradikalisasi adalah tumbuhnya kembali komitmen ideologis bersama, baik di pihak Muslim maupun Kristen, untuk kembali terlibat dalam konflik kekerasan. Reradikalisasi adalah lawan deradikalisasi, yang sering dipahami sebagai “delegitimasi atas prinsip-prinsip ideologis yang mendasari aksi-aksi kekerasan” (Hwang, 2018: 4). Pertanyaannya, apakah insiden kekerasan oleh kelompok MIT akhir-akhir ini menunjukkan bahwa masyarakat Poso kembali mengalami radikalisme? Terkait dengan beberapa program deradikalisasi di wilayah itu, yang dilakukan baik oleh pemerintah, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), maupun pihak-pihak lain, apakah aksi-aksi di atas menunjukkan bahwa program-program ini telah gagal?

Sementara itu, juga dalam maknanya yang longgar, yang dimaksud rekonsiliasi adalah kembalinya pola-pola hubungan yang bersahabat di antara komunitas Muslim dan Kristen, seperti yang disaksikan di Poso sebelum konflik terjadi. Dalam literatur konflik kekerasan, salah satu tantangan besar rekonsiliasi adalah reintegrasi individu-individu kombatan yang sebelumnya terlibat dalam konflik bersenjata. Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, reintegrasi dipahami sebagai “proses-proses dengan apa para mantan kombatan memperoleh kembali statusnya sebagai warga sipil dan mendapatkan pekerjaan dan pemasukan yang tetap” (dikutip dalam McRae, 2009: 1). Proses-proses ini biasanya melibatkan penyediaan bantuan ekonomi, baik berupa peningkatan keterampilan teknis untuk bekerja maupun bantuan keuangan langsung, kepada para mantan kombatan sehingga mereka tidak lagi aktif terlibat dalam konflik kekerasan. Terkait Poso pascakonflik, baik pemerintah maupun pihak-pihak di luarnya sudah menyalurkan beberapa jenis bantuan ekonomi seperti ini, yang terus berlanjut hingga kini. Apakah masih berlanjutnya aksi-aksi kekerasan di atas menunjukkan kegagalan skema-skema bantuan ekonomi itu?

Pertanyaan-pertanyaan dalam dua bingkai di atas – reradikalisasi atau rekonsiliasi – sengaja pertama-tama kami ajukan, karena sementara kita tahu jawabannya cukup mudah dan tidak terlalu mengagetkan, yakni bahwa “masyarakat Poso tidak mengalami reradikalisasi, tetapi juga belum mengalami rekonsiliasi secara penuh,” kami justru ingin menggali proses-proses binadama yang sudah dijalankan di Poso tetapi belum berlangsung

maksimal. Inilah bingkai pertanyaan kami yang ketiga, yang terkait dengan “upaya-upaya binadamai” (*peacebuilding*), yakni penciptaan dan penumbuhan hubungan-hubungan di antara berbagai segmen masyarakat yang konstruktif dan berakibat jangka panjang.

Terkait masyarakat pascakonflik seperti di Poso, upaya-upaya binadamai berguna untuk mencegah, mengurangi, mengubah, dan membantu orang-orang untuk sembuh dari kekerasan dalam berbagai bentuknya. Pada saat yang sama, binadamai memperkuat orang untuk memperkuat hubungan-hubungan sosial pada semua tingkatan, hingga hidup dan lingkungan mereka yang mulai kembali bersahabat bisa terus dipertahankan. Kata kunci dari binadamai adalah hubungan-hubungan yang harus dijalin secara strategis, baik oleh mereka yang berada di dalam konflik maupun di luarnya. Bagi sarjana dan pegiat binadamai seperti Lisa Schirch, hubungan-hubungan ini adalah satu bentuk kuasa (*power*) atau modal sosial: “Ketika orang-orang mulai mengulurkan tangan dan saling berhubungan, mereka lebih mungkin untuk bekerja bersama menyelesaikan konflik” (2004: 8-9).

Ada tiga kesimpulan pokok yang ingin kami garisbawahi dalam laporan ini. *Pertama*, aksi-aksi teroris kelompok MIT *bukan* merupakan bukti bahwa masyarakat Poso kini mengalami reradikalisasi. Masyarakat Poso pada umumnya, termasuk para ikhwan dan jihadis,² yang dulu menjadi pilar aksi-aksi kekerasan di Poso, kini sudah berpandangan bahwa situasi sekarang sangat berbeda dibanding dulu, bahwa tidak ada alasan ideologis atau politis untuk mendukung kelompok-kelompok seperti MIT, dan bahwa konflik komunal yang pernah terjadi hanya mendatangkan kerugian kepada semua pihak, Muslim maupun Kristen.

Kedua, meski dukungan masyarakat kepada kelompok MIT hampir tidak ada, rekonsiliasi di antara mereka belum berlangsung penuh. Kedamaian yang kini makin dirasakan masyarakat Poso masih rentan diganggu oleh sisa-sisa pengaruh ideologi garis keras, yang bersifat eksklusif dan membenarkan aksi-aksi kekerasan, yang masih mungkin mempengaruhi segmen-segmen tertentu masyarakat Poso, termasuk anak-anak muda dan kelompok rentan lainnya. Kedamaian mereka itu juga terus diganggu masih bertahannya dukungan kepada kelompok MIT oleh pihak-pihak di luar Poso, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ketiga, langkah-langkah penguatan infrastruktur binadamai sudah berlangsung cukup baik di Poso, seperti tampak dalam sektor-sektor keamanan, pendidikan, dan sosial-budaya. Langkah-langkah di atas dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah, khususnya Polri yang makin mendahulukan sisi pencegahan dari tumbuhnya ekstremisme kekerasan, para pemimpin agama yang makin mengarusutamakan pendidikan terbuka dan moderat, dan para aktivis muda di bidang perdamaian dan lintas-agama yang makin rajin membangun jembatan di antara kedua komunitas agama dominan di Poso. Akhirnya, langkah penguatan

² Ikhwan adalah sebutan yang biasa digunakan di Poso untuk menunjuk mereka, umumnya anak-anak muda, yang aktif terlibat sebagai bagian dari milisi Muslim ketika konflik komunal berlangsung. Kata itu berasal dari Bahasa Arab, yang artinya “saudara”. Sebutan lain yang terkait dengannya adalah jihadis, yang khusus digunakan untuk menunjuk mereka yang terlibat dalam aksi-aksi *amaliyat* (operasi), yang mereka anggap bagian dari *jihad* (perang suci), meskipun dengan tingkat keterlibatan beragam. Sebutan ikhwan dan jihadis digunakan di sini mengikuti cara mereka mengidentifikasi diri mereka sendiri.

infrastruktur binadamai lainnya yang sangat penting di Poso adalah terlibatnya kelompok-kelompok perempuan sebagai pilar perdamaian jangka panjang. Sayangnya, langkah-langkah itu masih kurang memperoleh dukungan seperti yang seharusnya diterima.

Sebelum ketiga kesimpulan besar di atas kami uraikan dan diskusikan satu per satu, laporan ini akan diawali paparan singkat mengenai kronologi konflik kekerasan di Poso, yang menjadi latar belakang dinamika konflik di sana. Akhirnya, laporan ini akan ditutup dengan tawaran rekomendasi kepada pihak-pihak yang relevan.

Laporan ini disusun berdasarkan wawancara dengan 45 narasumber yang tersebar terutama di Poso, tetapi juga di Palu dan Jakarta. Mereka terdiri dari wakil pemerintahan, termasuk jajaran pemerintahan daerah dan kepolisian resor, serta badan-badan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di wilayah Poso. Kami juga mewawancarai tokoh-tokoh agama dan masyarakat, kalangan pendidik dan tokoh-tokoh pemuda, termasuk mantan ikhwan dan jihadis yang pernah terlibat aktif dalam konflik kekerasan di Poso. Untuk menangkap suara kaum perempuan, kami juga sengaja mewawancarai beberapa istri, janda atau ibu di Poso, yang anggota keluarga mereka terkait dengan konflik kekerasan di Poso atau tempat-tempat lainnya.³ Selain dari wawancara, penulisan laporan ini juga diperkuat observasi lapangan, studi kepustakaan dan liputan media massa, baik nasional maupun lokal.

II. SELINTAS TENTANG KONFLIK POSO

Menyusul berakhirnya Orde Baru pada 1998, konflik kekerasan pecah di Poso, seperti juga terjadi di Ambon dan Maluku Utara. Namun berbeda dari di wilayah-wilayah lain, konflik di Poso terus berlangsung hingga kini. Konflik kekerasan ini dapat dibagi ke dalam tiga kategori besar: (1) kekerasan komunal antara kaum Muslim dan Kristen (1998-2002); (2) kekerasan teror sporadis, yakni aksi-aksi kekerasan yang umumnya menargetkan sasaran-sasaran Kristen (2002-2006); dan (3) kekerasan teroris oleh kelompok-kelompok yang belakangan terkait dengan pembentukan MIT di bawah pimpinan Santoso (2007-sekarang). Meskipun saling terkait, ketiga jenis konflik di atas memiliki asal-usul dan dinamika yang berbeda, di mana satu jenis konflik kekerasan bertransformasi menjadi jenis konflik kekerasan lainnya. Untuk memahami naik atau turunnya dukungan kepada konflik kekerasan di Poso, termasuk dalam bentuknya yang terakhir seperti diwakili MIT, pembedaan ini wajib diperhatikan.

1. Konflik Komunal Muslim-Kristen (1998-2001)

Konflik komunal di Poso pada mulanya pecah sebagai rangkaian kerusuhan di antara gang Muslim dan Kristen. Kerusuhan bermula pada malam Natal 1998, yang mereda dengan dimulainya puasa Ramadhan di tahun yang sama. Episode konflik ini dipicu insiden ketika seorang pemuda Kristen yang mabuk menikam seorang pemuda Muslim, yang kemudian berkembang menjadi desas-desus dan perang antar-gang pemuda kedua

³ Dalam laporan ini, sebagian nama narasumber ditulis sesuai aslinya, sedang sebagian lainnya tidak, sesuai kesepakatan kami dengan mereka. Kecuali disebutkan lain, wawancara dilakukan ketiga penulis laporan ini, yang mewakili tim peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.

komunitas. Alkohol dikambinghitamkan atas insiden di atas, sehingga kaum Muslim menuntut toko-toko minuman keras ditutup selama Ramadhan. Menjelang malam Tahun Baru, umat Kristen menentang langkah ini. Namun, setelah berlangsung pertemuan antara wakil-wakil pemerintah, petugas keamanan, dan tokoh-tokoh agama, semua pihak bersepakat untuk melarang penjualan alkohol selama Ramadhan.⁴

Episode baru konflik kekerasan berlangsung lagi pada 24-28 Mei 2000, yang paling keras dalam konflik Poso dari segi korban jiwa yang diakibatkannya. Kali ini, kekerasan dipicu pembunuhan seorang pemuda Muslim di Taripa, Pamona Timur. Fase kekerasan ini berlangsung selama Juli 2000 dan dianggap sebagai balas dendam milisi Kristen setelah dua rentetan kekerasan yang sebagian besarnya didominasi milisi Muslim. Insiden kekerasan paling terkenal pada fase ini dimulai pada 28 Mei, ketika milisi Kristen menyerang perkampungan dan pesantren Muslim di Kilometer 9, Desa Togolu, Kecamatan Lage. Ratusan orang terbunuh dalam kekerasan tahap ketiga ini, sebagian besar Muslim (HRW, 2002; ICG, 2004).

Fase konflik di atas mengundang masuknya kelompok-kelompok lain ke Poso, yang umumnya jihadis, tetapi bisa digolongkan ke dua kelompok besar. Kelompok pertama asal-usulnya terkait dengan Pemberontakan Darul Islam (DI) yang terjadi pada 1950 dan 1960-an, khususnya Jamaah Islamiyah (JI) dan Mujahidin KOMPAK (Komite Aksi Penanggulangan Akibat Krisis), tetapi juga kelompok-kelompok yang lebih kecil seperti Laskar Jundullah. Mereka tiba beberapa minggu setelah insiden Kilometer 9 dan terdiri dari beberapa ratus Muslim terlatih yang merupakan veteran perang Afghanistan atau telah menjalani pelatihan di Filipina Selatan. Kelompok kedua adalah Laskar Jihad, sayap milisi Forum Komunikasi Ahlus Sunnah (FKAWJ), yang tiba di Poso pada 2001 (McRae, 2016: 181-188).

Meskipun Laskar Jihad, Mujahidin KOMPAK, dan JI memandang diri mereka sama-sama melindungi kaum Muslim, ada perbedaan ideologis penting di antara Laskar Jihad, di satu sisi, dengan JI dan Mujahidin KOMPAK, di sisi lain. Pertama, Laskar Jihad memandang perjuangan mereka dalam kerangka yang ultranasionalis, berupaya menjaga kaum Muslim dan negara dari serangan Kristen ketika kapasitas negara sedang lemah. Berbeda dari itu, JI dan Mujahidin KOMPAK berpandangan bahwa pemerintah Indonesia itu sendiri tidak Islami (*thaghut*) dan karenanya mereka berupaya untuk meruntuhkannya. Kedua, karena alasan di atas, sementara Laskar Jihad menghentikan keterlibatan mereka sesudah kesepakatan damai Malino (lihat lebih jauh di bawah), JI dan Mujahidin KOMPAK tidak, dan inilah yang menyebabkan berkembangnya konflik komunal di Poso

⁴ Isu alkohol menyembunyikan lokus konflik yang sebenarnya lebih besar dan rumit. Meski tidak langsung terkait dengan tema riset yang dilaporkan sekarang ini, sebagai latar belakang, penting di sini disebutkan bahwa para ahli menyebut beberapa faktor yang dianggap menyumbang terhadap kekerasan komunal di Poso: (a) persaingan ekonomi atas tanah dan hasil bumi antara penduduk asli desa Pamona yang Protestan, kelompok Bugis, dan para transmigran Jawa; (b) ketidakpastian dan kekhawatiran atas status dan kedudukan berbagai kelompok yang bersaing setelah Suharto dilengserkan pada 1998; (c) persaingan antar-pejabat pemerintah atas jabatan-jabatan birokratis; dan (d) disintegrasi tatanan pembagian kekuasaan birokratis antara penduduk Kristen pribumi dengan penduduk Muslim pendatang (Aragon, 2001; HRW, 2002; van Klinken, 2007; Braithwaite et al., 2010; McRae, 2016). Kekhawatiran atas kekuasaan politik dan akses terhadap patronase negara, ditambah lemahnya penegakan hukum, menciptakan kondisi yang permisif bagi terjadinya kekerasan.

menjadi kekerasan terorisme yang lebih terorganisasi (McRae, 2016: 188-190).

Sementara itu, perbedaan utama antara Mujahidin KOMPAK dan JI terletak dalam alur menuju partisipasi aktif dalam apa yang mereka sebut “jihad”. Bagi JI, bergabung dalam *jihad qital* (perang suci) merupakan puncak dari sebulan indoktrinasi keagamaan yang dilakukan para anggota JI, sebulan pelatihan militer yang dipimpin para pelatih JI, dan persiapan keagamaan berkelanjutan lewat *halaqah* (lingkaran kajian agama) yang lebih kecil (ICG, 2004: 8). Berbeda dari itu, Mujahidin KOMPAK menuntut masa persiapan lebih pendek, antara tiga minggu hingga sebulan, yang lebih berpusat pada latihan militer dan menekankan pendekatan “*learning by doing*” (ICG, 2004: 8). Karena lingkungan Tanah Runtuh jadi benteng aktivitas jihad JI, para jihadis setempat umumnya disebut Mujahidin Tanah Runtuh. Sementara itu, karena Mujahidin KOMPAK berkubu di lingkungan Kayamanya, mereka sering disebut Mujahidin Kayamanya. Tetapi belakangan, “Setelah pimpinan Kayamanya jatuh pada 2004, para anggotanya berangsur beralih di bawah pimpinan Tanah Runtuh” (ICG, 2007: 6).

Di Poso, para jihadis dari kedua kubu merekrut anak-anak muda setempat untuk memperoleh latihan militer dan arahan keagamaan, termasuk soal jihad. Sebelum konflik, banyak dari pemuda-pemuda itu preman yang lebih suka minum alkohol ketimbang mengaji. Umumnya mereka bergabung dengan kelompok-kelompok jihadis karena alasan balas dendam, setelah kematian sanak saudara mereka. Menurut ICG, sebelum kedatangan JI, para milisi Muslim di Poso mengandalkan senjata-senjata tradisional seperti tombak, pisau, dan bom ikan (2007: 3). Para pelatih JI memberi mereka latihan militer dan mengajari mereka menggunakan senjata api. Para jihadis Tanah Runtuh terbagi ke dalam dua kelompok: sayap militer (kelompok *askari*) dan sayap dakwah Islam (kelompok *diniyah*) (ICG, 2007: 5).

Penting dicatat bahwa mayoritas, kalau tidak semua, anggota JI dari Poso tidak menyadari bahwa guru mereka faktanya adalah anggota JI sampai mereka menyaksikan guru-guru itu belakangan ditangkap polisi dan ditayangkan di televisi, termasuk dalam insiden Bom Bali 2002. Salah seorang jihadis dari Tanah Runtuh, yang terlihat jelas sadar akan JI, dalam penuturannya pernah mengikuti kamp pelatihan militer di Mindanao. Yang pasti, kedatangan milisi jihadis menandai peralihan yang menentukan dalam konflik ini, memberikan pihak Muslim keunggulan militer yang signifikan semasa bentrokan pada 2001.

2. Periode Teror Sporadis (2002-2007)

Pada Desember 2001, atas prakarsa Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (masing-masing Menkopolhukam dan Menkokesra saat itu), para tokoh agama dari kedua belah pihak mengumumkan kesepakatan damai Malino. Angkatan bersenjata juga meningkatkan peran mereka dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman di daerah tersebut (Braithwaite et al., 2009: 260-261). Pada Agustus 2002, konflik tampak akan kembali bergolak, tetapi sesudah itu situasi keamanan Poso meningkat sehingga kebanyakan jihadis merasa tak perlu dan tak tertarik lagi untuk melanjutkan serangan-serangan kekerasan.

Namun bagi para jihadis tertentu dari unsur JI Tanah Runtuh dan Mujahidin KOMPAK Kayamanya, kesepakatan Malino adalah kesalahan besar dan penghinaan terhadap kaum

Muslim. Haris, seorang jihadis senior dari Tanah Runtuh, menyampaikan pandangannya tentang kesepakatan damai itu demikian:

Menurut saya, kesepakatan Malino tidak menyentuh akar persoalan. Sejak konflik pecah, para korban Muslim di Tentena atau Kilometer 9 tak bisa memperoleh kepemilikan tanah. Para pengungsi harus mulai hidup mereka dari nol. Pemerintah gagal melihat hal ini. Itulah sebabnya kenapa kami sering melakukan protes. [Awalnya] kami mendengar tokoh generasi tua, termasuk Pak Adnan [Arsal].... Kami mengungkapkan ketidakpuasan, tetapi pemerintah tak mendengar. Jika kami bisa mengatakannya secara sopan: diplomasi telah [tertutup]. Kami menyerang kampung-kampung mereka [Kristen]. Lalu kami semua jadi semakin buas. [Kami melakukan] *fa'i* [perampokan]. Kami merekrut sejumlah orang baru dan kami memperluas operasi kami.⁵

Apa yang digambarkan Haris di atas adalah serangan yang disebut banyak orang sebagai “teror”, yang berlangsung sporadis. Periode teror ini dicirikan dengan pengeboman, penembakan, dan pembunuhan, sebagian besar menargetkan Kristen. Insiden-insidennya termasuk pembunuhan 13 penduduk Kristen di Poso dan Morowali oleh penembak gelap (Oktober 2003), pengeboman mobil mikrolet yang menewaskan enam orang di luar pasar Poso (November 2004); peledakan dua bom di sekitar pasar Tentena (28 Mei 2005); mutilasi tiga siswi (Oktober 2005); pengeboman pasar Palu (31 Desember 2005); dan dua ledakan bom rakitan yang menewaskan seorang pria dan seorang perempuan pada 2006. Menurut McRae, sekitar 150 orang, kebanyakan Kristen, terbunuh antara 2002 dan 2007 dalam serangan-serangan dalam periode teror sporadis ini (2016: 10).

Sesudah mempelajari situasi di atas, pada 11 dan 22 Januari 2007 unit anti-teror Indonesia, Densus 88, melakukan dua penyerbuan ke Tanah Runtuh (Karnavian, 2008). Penyerbuan dilakukan setelah berbulan-bulan negosiasi antara polisi, para perantara, dan kelompok jihadis untuk mencari jalan keluar yang damai menemui jalan buntu. Polisi menghimpun daftar 29 nama yang paling dicari, yang dianggap terlibat dalam banyak serangan dan pembunuhan pasca-Malino di Poso dan Palu. Selama penyerbuan, 16 orang terbunuh, lebih dari selusin orang tertangkap, dan polisi menemukan tempat penyembunyian senjata pabrikan dan bahan peledak terbesar sepanjang konflik (McRae, 2016: 270-272).

Akibat aksi-aksi di atas, sebagian besar ustaz JI melarikan diri dan para pelaku kriminal periode teror ditahan, diadili, dihukum, dan dipenjarakan tanpa ada serangan balasan (ICG, 2008: 1). Di tempat-tempat lain di Indonesia, penangkapan terhadap para jihadis yang sempat beroperasi di Poso juga dilakukan. Kehidupan di Poso setelah itu berlangsung relatif aman.

⁵ Wawancara Ihsan Ali-Fauzi dan Julie Chernov Hwang dengan Haris, mantan jihadis senior dari Tanah Runtuh, di Jakarta, Juli 2010.

3. Poso pasca-Penegakan Hukum (2007-Sekarang): Tumbuh dan Kiprah MIT

Situasi keamanan Poso kembali menjadi sorotan ketika beberapa insiden kekerasan terorisme terjadi antara 2012 dan 2014. Insiden tersebut misalnya penembakan warga non-Muslim di desa Sape dan Masani, pembunuhan dua anggota polisi di dusun Tamanjeka, penembakan di Polsek Poso Pesisir, pengeboman rumah warga kelurahan Kawua, bom bunuh diri di Polres Poso, dan beberapa aksi lainnya. Tetapi produsen aksi-aksi kekerasan tersebut bukanlah lagi JI, melainkan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) di Poso,⁶ yang kemudian bertransformasi menjadi MIT pimpinan Santoso.

Kelompok MIT di atas tidak hanya melakukan aksi-aksi teror, tetapi juga menjalankan program yang tidak dimiliki kelompok teroris lain di Indonesia, yakni pelatihan militer (*tadrib askari*). Terbongkarnya kamp pelatihan militer lintas organisasi di Jalin Jantho di Aceh pada awal 2010 menjadi salah satu pendorong JAT Poso untuk mengadakan program tersebut di Poso. Hal itu juga didorong anggapan mereka bahwa Poso pernah menjadi tempat perjuangan para jihadis lintas-organisasi dan tempat yang tidak mudah terendus (*secure base*) aparat keamanan. Dalam konteks ini, mereka yakin bahwa Poso bisa menjadi tempat lanjutan proyek Jantho di Aceh, selain pusat jihad pendirian negara atau kekhalifahan Islam.

Santoso dan MIT setidaknya telah mengadakan pelatihan militer tiga gelombang pada Januari-Maret 2011 dengan durasi waktu rerata seminggu di hutan pegunungan yang mengelilingi Poso.⁷ Pelatihan tidak hanya diikuti anggota JAT Poso, tetapi juga unsur-unsur dari luar pulau Sulawesi seperti Jawa, Bima, dan Kalimantan, bahkan luar negeri seperti Malaysia dan Uighur. JAT Poso makin percaya diri ketika panglima Laskar Jihad, Subagyo alias Daeng Koro, yang juga mantan anggota pasukan Sandhi Yudha (Kopashanda) dari kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bergabung pada akhir 2011 dan menjadi salah satu pelatih militer. Gerakan mereka mulai terendus aparat keamanan ketika para pelaku penembakan polisi di depan BCA Palu pada Mei 2011 tertangkap (Jones, 2013: 16). Ketika Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) didirikan, MIT segera bersumpah setia kepadanya pada Juli 2014. Akhirnya, pada November 2015, MIT merilis video dan menyebut diri mereka “Prajurit Negara Islam”, seraya menebar ancaman kepada pemerintah dan Polri.

Pemerintah Indonesia terus memburu mereka dalam beberapa operasi yang menggabungkan unsur tentara dan polisi. Pada November 2012, polisi berhasil menangkap Ustaz Yasin, tetapi Santoso dan Subagyo bersembunyi di Tamanjeka sambil melanjutkan program militer. Pada awal 2015, Polri memutuskan mengadakan Operasi Camar Maleo, yang berhasil menembak mati Subagyo namun gagal menangkap Santoso. Tetapi langkah

⁶ Asal-usul JAT Poso bisa dilacak pada 2010 ketika Agus Hamzah alias Abu Tholut, mantan ketua JI Mantiqi 3, meminta seorang napiter JI Poso yang bebas pada 2009, Ustaz Yasin, untuk menghimpun beberapa ikhwan dan mantan jihadis Poso dalam rangka pembentukan JAT Poso. Untuk detailnya, lihat laporan ICG, 2012.

⁷ Beberapa anggota JAT Poso yang tertangkap mengatakan bahwa Ustaz Yasin mengumpulkan beberapa senior JI Poso seperti Ustaz Abu Latif dan Anang Muhtadin alias Papa Enal pada Januari 2011 di Masamba, Poso Pesisir. Mereka sepakat membentuk JAT Poso, menunjuk Yasin sebagai amir JAT-Poso. Yasin mengangkat Santoso sebagai ketua bidang militer dan Abu Latif sebagai ketua bidang dakwah.

pemolisian berikutnya, dalam Operasi Tinombala, berhasil menembak mati Santoso pada 18 Juli 2016 dan menangkap Basri pada 13 September 2016. Sisa-sisa kelompok MIT ini terus bergerilya di hutan dan masih diburu.

Meskipun kelompok MIT kini kurang berpengaruh di tingkat masyarakat Poso dan para pemimpinnya berhasil dibunuh atau ditangkap aparat keamanan, langkah-langkah MIT telah menjadikan Poso argumen atau bukti bahwa pembentukan kekhalifahan Islam itu dimungkinkan dan masih terus diusahakan. Poso menjadi tempat persiapan para jihadis dari berbagai tempat di Indonesia: dari ranah itu Santoso menyatakan dukungannya kepada ISIS pada 2014; dan dari Poso pula Santoso menyerukan *amaliyat* yang dijalankan orang-orang lain, seperti di Bima (lihat ICG 2010 dan 2012; IPAC 2016a, 2016b dan 2017).

III. RERADIKALISASI MASYARAKAT POSO?

Apakah berkembangnya MIT belakangan ini menunjukkan reradikalisasi masyarakat Poso? Jawabannya tidak, meskipun rekonsiliasi masyarakat Poso belum berlangsung penuh. Masyarakat Poso kecil sekali kemungkinannya untuk mengalami reradikalisasi karena beberapa faktor: (1) kondisi Poso secara umum sudah makin aman dan kehidupan berjalan makin normal; (2) masyarakat pada umumnya memandang konflik di masa lalu sebagai sesuatu yang merugikan semua pihak; dan (3) para ikhwan, bahkan mantan napiter, sudah mulai terlibat dalam politik formal di Poso, antara lain dengan aktif terlibat dalam Pemilu 2019. Bagian ini akan membahas butir-butir di atas. Selain itu, bagian ini akan kami lengkapi dengan laporan mengenai dua butir penting lain: (4) *disengagement* para ikhwan dan mantan jihadis di Poso; dan (5) peran perempuan dalam menghambat proses reradikalisasi.

1. Kondisi Poso yang makin Aman

Menurut banyak narasumber di pemerintahan daerah dan polisi di Poso – termasuk Kesbangpol, Kasat Bimas dan Kasat Intel di Polres Poso – dukungan masyarakat Poso kepada kelompok MIT sekarang sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Mereka menyatakan, meskipun tetap ada kewaspadaan, Poso kini adalah tempat yang aman untuk ditempati dan bahkan dikunjungi wisatawan luar. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa kelompok MIT belakangan ini sudah menyingkir dan menyelenggarakan operasinya di wilayah sekitar Gunung Biru, Tamanjeka, Poso Pesisir, yang berjarak sekitar 50 kilometer dari pusat Poso Kota, dan sisa orang Poso yang masih bergabung di sana hanya Ali Kalora.

Para narasumber menyatakan, jika pun ada, dukungan kecil kepada MIT diberikan lebih karena alasan solidaritas, bukan ideologis. Ini terlepas dari fakta bahwa Santoso sebagai pribadi dulu dianggap berjasa kepada masyarakat Poso, bahkan dijuluki *syahid*. Meskipun banyak orang ikut menghadiri acara pemakamannya ketika dia akhirnya terbunuh, hal itu lebih menunjukkan penghormatan terakhir mereka kepada Santoso sebagai manusia ketimbang dukungan kepada MIT. Santoso dikenang sebagai orang yang sederhana, jujur, selalu rela berkorban untuk orang lain selama hidupnya. Ketika dia dimakamkan, ada beberapa spanduk bertuliskan pujian kepadanya sebagai pahlawan.

Di Tamanjeka sendiri, di mana kelompok MIT antara lain beroperasi, kehidupan tampak normal, meski situasi keamanan kadang terganggu oleh Operasi Tinombala dan jalan masuk satu-satunya ke wilayah itu rusak cukup parah. Ketika kami mengunjunginya, kepala dusun (kadus) di situ, Muhammad Sambara, tampak baru pulang bertani. Selain bercerita tentang sisi enak dan tidak enak menjadi kadus di situ, dia juga bercerita bahwa di dusun itu ada beberapa mantan napiter, bahkan yang baru saja bebas. Dia juga menyatakan bahwa persiapan menyambut Pemilu 2019 sedang berlangsung di sana: “Semua warga telah didata, tetapi saya tidak tahu apakah nanti mereka memilih atau tidak,” katanya.⁸ Kami diantar ke dusun itu oleh Bapak Iptu Andi Cakra, Kepala Unit Bimbingan Masyarakat (Kanit Binmas) kepolisian Poso Pesisir, yang tampak sangat akrab dengan warga sekitar. Kami harus berhenti di hampir tiap rumah yang kami lewati, untuk minum kopi dan makan duren, karena tuan rumahnya ingin bersilataturahmi dengan Bapak Andi.

Di Poso Kota, para ikhwan bahkan bisa dengan terbuka menolak ajakan kelompok MIT. Yono atau Sumiyono, misalnya, tegas mengecam aksi-aksi kekerasan kelompok itu, meskipun Santoso dulu kawan baiknya. “Cara-cara kekerasan yang mereka lakukan dan mereka minta untuk kita dukung sudah tidak berdasar lagi sekarang. Poso sudah berubah,” katanya.⁹ Ketika konflik komunal di Poso terjadi, 45 orang sanak familinya mati terbunuh, termasuk kakak kandung dan kakeknya, dalam insiden serangan milisi Kristen di Kilometer 9 pada Mei 2000. Keinginannya membalas dendam mendorongnya menggabungkan diri dengan milisi Muslim di Tanah Runtuh, di mana dia ikut pengajian, latihan perang, dan tumbuh menjadi jihadis, meskipun sebelumnya dia gemar adu ayam dan mabuk-mabukan. Meskipun belakangan berbeda pilihan jalan hidup, dia tetap menghormati Santoso dan dia termasuk ikhwan yang ikut memikul keranda mayatnya sebelum jenazahnya dimakamkan.

2. Trauma terhadap Konflik Masa lalu

Pandangan mengenai situasi Poso yang sudah makin aman juga disampaikan para pemimpin masyarakat sipil seperti Ketua FKUB Kabupaten Poso, Yusuf Runa, yang rumahnya sempat terbakar ketika konflik kekerasan terjadi. Menurutnya, masyarakat sudah kapok dengan akibat konflik: “Kalah jadi arang, menang jadi abu,” kenangnya.¹⁰

Kesaksian tentang Poso yang makin aman juga diberikan warga biasa yang menikmati “Blues Night” di satu kafe di Poso Kota pada satu malam Minggu, 1 September 2018. Ketika satu dari kami tiba di kafe itu bersama Iin Brur (seorang mantan jihadis, lihat lebih jauh di bawah), banyak pengunjung kafe – termasuk gitaris (Kiki) dan penyanyi (Naser), yang belakangan tampil memainkan *live music* – menegur kami dengan akrab. Sebelum terlibat konflik sebagai jihadis Tanah Runtuh, Iin Brur memang seseorang yang aktif bermusik, termasuk membentuk band. “Poso kini aman dan kami ingin main musik lagi,” kata Naser. Menurut Iin Brur, ketika konflik pecah, Kiki pergi ke Gorontalo untuk

⁸ Wawancara dengan Muhammad Sambara, 14 Maret 2019.

⁹ Wawancara dengan Yono, 9 Januari 2019.

¹⁰ Wawancara dengan Yusuf Runa, 3 September 2018.

melanjutkan pendidikan, sedang Naser mengungsi dan “rela dipanggil pengecut.”¹¹

Ketika ditanya mengapa para pedagang keturunan Tionghoa belum banyak terlihat kembali di pasar-pasar di Poso, tidak seperti keadaan sebelum konflik, jawaban para narasumber cukup beragam. Sebagian narasumber menyatakan bahwa mereka pindah ke tempat-tempat lain untuk berusaha (khususnya ke Tentena atau Palu) dan sudah merasa nyaman di sana. Sebagian lainnya menyatakan bahwa mereka mungkin saja masih waswas dengan situasi keamanan Poso, yang mereka pandang cukup wajar. Namun demikian, para narasumber menyatakan bahwa hal itu tidak menandakan bahwa situasi Poso kini tidak lebih baik dari saat terjadinya konflik. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa banyak proyek pembangunan yang kini berlangsung di Poso dijalankan oleh Aho atau Steven Lianto, seorang pengusaha keturunan Tionghoa. Aho adalah kakak Acheo atau Hendrik Lianto, staf khusus Gubernur Sulawesi Tengah sekarang dan calon anggota legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah.

Terkait Operasi Tinombala, atau operasi-operasi lain yang kini dilancarkan untuk menghentikan kelompok MIT, para narasumber menyatakan tidak tahu banyak mengenai, karena mereka tidak terlibat di dalamnya dan hanya fokus mengemban tugas mereka sendiri. Mereka mengaku hanya sesekali dipanggil oleh pemimpin operasi itu dalam rangka pemberitahuan dan koordinasi. Mereka pada umumnya berharap bahwa operasi-operasi keamanan di atas bisa segera selesai dan wilayah Poso dinyatakan aman sepenuhnya. Dua narasumber khusus, yang tidak mau namanya disebutkan, menyatakan bahwa mereka juga menerima pertanyaan bernada mencurigai dari masyarakat, yang merasa tidak mengerti mengapa operasi besar-besaran yang selama ini berjalan tidak juga mampu menyelesaikan gangguan yang ditimbulkan oleh kelompok MIT, yang menurut berita yang mereka baca dan dengar hanya didukung oleh segelintir pengikut, sementara Santoso sendiri sudah meninggal dan pemimpinnya yang masih hidup sekarang, Basri, sudah tertangkap.

3. Dukungan Ikhwan terhadap Pemilu

Makin normalnya kehidupan di Poso juga ditunjukkan oleh fakta bahwa beberapa mantan ikhwan dan jihadis, bahkan napiter, kini aktif terlibat dalam politik praktis dan ikut bergiat dalam partai-partai politik yang akan ikut bersaing dalam pemilu legislatif dan presiden serentak tahun 2019 ini. Selain sebagai pendukung dalam persiapan kampanye partai, beberapa di antara para ikhwan ikut terlibat sebagai pengurus partai, bahkan sebagai calon anggota legislatif dari partai tertentu.

Salah satu contohnya adalah Yono, yang sudah disebut di atas. Menjelang pemungutan suara pada 17 April 2019 ini, dia sibuk kampanye memenangkan partainya dan mengusahakan agar caleg (calon anggota legislatif) dari partainya terpilih. Kini dia wakil ketua Partai Berkarya pimpinan Tommy Soeharto, dan karenanya dia merasa dihargai: “Saya ingin ikut menentukan. Kalau nanti ada anggota legislatif yang kerjanya tidak beres, saya sendiri yang akan melemparnya dari lantai dua [gedung parlemen Poso],”

¹¹ Wawancara dengan Iin Brur, 2 September 2018.

katanya.¹²

Tetapi Pemilu 2019 juga didukung mantan jihadis, bahkan mantan napiter. Salah satunya Ma'mur Lapido, yang ketika kami temui sedang sibuk berkampanye agar terpilih sebagai caleg dari Partai Golkar. Ma'mur sempat dipenjara (2003-2004) karena terlibat perampokan mobil boks distributor Djarum Super antara lain bersama Santoso, dalam operasi yang mereka sebut *fa'i* (merampas harta orang kafir untuk keperluan jihad). Dia sekarang berjuang sebagai caleg Golkar, karena partai inilah yang kini berkuasa di Kabupaten Poso, seperti ditunjukkan oleh fakta bahwa bupati sekarang adalah Ketua Dewan Pengurus Partai (DPD) Golkar. "Maksud saya adalah agar saya tidak menggiring masyarakat untuk berlawanan dengan pemerintah. Jika saya seiring dengan pemerintah, otomatis keinginan masyarakat akan mudah tersalurkan," kata Ma'mur.¹³

Kesibukan Yono dan Ma'mur di atas didukung banyak tokoh penting di Poso, termasuk Ustaz Adnan Arsal, yang sudah disebut di atas. Dalam pemilu kali ini, Ustaz Adnan bahkan merestui salah seorang anaknya, Muhammad Fauzan Arsal (Ojan), untuk ikut berkompetisi sebagai caleg. Ditanya apakah ada syarat-syarat tertentu agar seorang ikhwan bisa terlibat dalam politik praktis, dia menjawab normatif saja: "Selama Anda tidak menggadaikan akidah, silakan [pilih partai apa saja]. Bila akidah tergadaai, saya bilang tidak ada gunanya kamu hidup," katanya teguh berprinsip.¹⁴ Tetapi banyak sumber kami di luarnya melaporkan bahwa dia lebih suka jika anak-anak asuhnya mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), atau Partai Gerindra, yang dalam pemilihan presiden kali ini sama-sama mendukung pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno.

Pilihan politik Ustaz Adnan juga tercermin dalam keterlibatan Fauzan sebagai caleg. Meski bukan kader atau pengurus Partai Gerindra, dia membawa tiket sebagai caleg dari partai itu, sejalan dengan rekomendasi para ulama yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 (merujuk ke Aksi Bela Islam, 2 Desember 2016, di Jakarta). Fauzan sendiri mengaku maju sebagai caleg karena dia ingin memperjuangkan aspirasi para ikhwan. Dia juga mau menghilangkan stigma orang-orang di luar Poso bahwa kaum Muslim Poso, terutama para ikhwan, adalah gerombolan teroris. Selain itu, dia juga ingin mempromosikan Syariat Islam, yang menurutnya dimungkinkan dalam demokrasi.¹⁵

Perbedaan pilihan partai politik Yono, Ma'mur dan Fauzan memperlihatkan cairnya aliansi-aliansi politik yang dibentuk para ikhwan di Poso, seperti juga terjadi di tingkat regional dan nasional. Umum diketahui, pilihan kebijakan politik belakangan ini sulit dilihat dari misalnya apakah seseorang mendukung partai politik Islam atau sekular. Seperti ditunjukkan Buehler (2011), banyak politisi partai sekular juga mempromosikan Syariat untuk mendulang suara.

Dalam aras lain, dengan mendukung partai-partai berbeda, para ikhwan ingin memenangkan aspirasi mereka melalui beragam saluran, hingga tingkat kemungkinannya

¹² Wawancara dengan Yono, 10 Januari 2019.

¹³ Wawancara dengan Ma'mur Lapido, 10 Januari 2019.

¹⁴ Wawancara dengan Muhammad Adnan Arsal, 9 Januari 2019.

¹⁵ Wawancara dengan Muhammad Fauzan Arsal, 9 Januari 2019.

untuk berhasil lebih tinggi. Mengikuti kata-kata bijak, mereka tidak mau meletakkan semua telur di keranjang yang sama. “Makin banyak ikhwan atau simpatisan ikhwan duduk di pemerintahan, makin mudah kepentingan ikhwan diperjuangkan,” kata Yono. Mereka banyak belajar dari Aksi Bela Islam 212 yang menurut mereka berhasil mengalahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dalam Pilkada Jakarta 2017. “Selama ini para ikhwan golput. Kalau kita bersatu dan aktif dalam demokrasi, tentu kita bisa menang dan lebih mudah memperjuangkan Islam,” kata ikhwan lain kawan Yono.

Di Poso, aktivisme politik itu juga dimaksudkan untuk memperkuat model aktivisme politik lain, yang juga dilakukan secara damai, seperti melobi pemerintah atau anggota dewan tingkat lokal. Ini misalnya mereka lakukan terkait penunjukan pejabat daerah untuk posisi-posisi seperti kepala dinas, yang mereka upayakan diduduki wakil Muslim. Aktivisme sejenis lainnya adalah mengadakan protes damai, misalnya terkait isu “Tahun 2019 Ganti Presiden secara Konstitusional” atau pembakaran “bendera Tauhid”. Dengan mengerjakannya sekaligus, strategi politik lewat pemilu dan di luarnya diharapkan saling mendukung.

Karena perkembangan-perkembangan di atas, Budiman Maliki, kini Ketua KPU Kabupaten Poso, menyatakan optimis bahwa tingkat partisipasi dalam pemilu 2019 ini akan meningkat di Poso. Dia menduga, jumlah golput di Poso juga tergantung pada apakah para ikhwan ikut berpartisipasi dalam pemilu atau tidak.¹⁶ Menarik juga dicatat bahwa Budiman sendiri merasa perlu bersilatirrahi dan memperoleh restu Ustaz Adnan ketika hendak mencalonkan diri sebagai anggota KPU. Dia sebelumnya dikenal sebagai aktivis LSM senior di Poso.¹⁷

Karena alasan di atas, menjelang 17 April 2019, Budiman gembira bahwa acara sosialisasi pemilu yang dibuat kantornya, misalnya, ikut didukung tokoh seperti Hasanudin, yang juga menantu Ustaz Adnan. Seperti mertuanya, Hasanudin juga figur kunci dalam sejarah konflik Poso: Pada Oktober 2002, kader JI kelahiran Semarang itu ditunjuk JI memimpin operasi JI di Poso, kepada siapa semua ikhwan harus minta restu sebelum melakukan aksi apa pun, termasuk mutilasi tiga siswi yang sangat menghebohkan itu. Itulah sebabnya dia dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, rekor hukuman tertinggi di antara para ikhwan Poso. “Kalau dulu musuhnya jelas, sekarang siapa musuhnya? Mau [jihad] melawan Densus? Seberapa kuat kita? Situasinya sudah berubah,” katanya, menjelaskan dukungannya kini kepada pemilu.¹⁸

¹⁶ Karena kelangkaan data, mustahil memverifikasi dugaan Budiman ini. Selain itu, jumlah golput dalam pilpres dan pilkada di Poso sendiri tidak selamanya berjalan seiring: sementara jumlah golput dalam pilpres sedikit menurun, dari 21% dalam Pilpres 2009 ke 20% dalam Pilpres 2014, jumlah golput justru sedikit meningkat dari 17,25% dalam Pilkada 2010 ke 18,32% dalam Pilkada 2015. Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah: seseorang memilih golput dalam pilkada, tetapi aktif berpartisipasi dalam pilpres, atau sebaliknya. Jika kemungkinan ini benar, bayangkan perubahan yang terjadi dalam jumlah golput di Poso jika banyak ikhwan atau mantan jihadis memilih untuk bersama-sama memenangkan calon tertentu dalam pilpres, seraya melupakan perbedaan pilihan politik dalam pilkada, seperti kecenderungannya bisa kita lihat sejauh ini.

¹⁷ Wawancara dengan Budiman Maliki, 2 September 2018.

¹⁸ Wawancara dengan Hasanudin, 15 Maret 2019.

Dengan sendirinya tak semua ikhwan bersedia mendukung pemilu. Sebagiannya karena alasan ideologis, yang memandang pemilu masih sistem *thaghut*. Tentang ini, Fauzan bercerita: “Baliho saya sempat dirusak oleh teman saya yang tidak setuju dengan pencalonan saya. Bahkan, flyer kampanye saya di media sosial diedit, ditambah gambar salib untuk menunjukkan bahwa saya sudah kafir.”¹⁹ Tetapi sebagian ikhwan lainnya khawatir bahwa keterlibatan para ikhwan dalam pemilu akan merusak persaudaraan mereka. “Saya khawatir mereka cekcok dan berkelahi. Jika itu terjadi, repot mengurusnya,” kata Sofyan Djumpai atau Pian, mantan pimpinan mujahidin Kayamanya yang kini sibuk berbisnis.²⁰

4. Deradikalisasi atau “Disengagement”?

Apakah perkembangan positif di Poso seperti diutarakan di atas menunjukkan keberhasilan program-program seperti deradikalisasi? Meskipun menarik, pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh riset ini, karena bukti-bukti yang ada sekarang tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini dengan memuaskan. Di Indonesia, deradikalisasi merujuk kepada kegiatan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sipil untuk mendelegitimasi ideologi yang melandasi aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan dulu. Kami tidak memiliki data awal tentang kegiatan yang dijalankan, sehingga mustahil kami bisa menilainya dengan memadai.

Tetapi menarik membandingkan situasi beberapa ikhwan (dan napiter) yang kali ini kami wawancarai dengan situasi mereka lima tahun lalu, seperti dilaporkan Hwang, Panggabean, dan Ali-Fauzi (2013). Sebelumnya, perlu diingat bahwa dalam artikel mereka, Hwang, Panggabean, dan Ali-Fauzi hanya melaporkan bahwa ke-23 ikhwan yang mereka wawancarai sudah mengalami *disengagement*, bukan deradikalisasi. *Disengagement* bisa terjadi karena alasan fisik, misalnya dipenjara, sehingga seseorang tidak mungkin melakukan aksi-aksi kekerasan. Tetapi jika tidak dipenjara, *disengagement* terjadi karena “keputusan yang diambil oleh individu anggota satu kelompok teror, gerakan radikal, atau gang untuk berhenti dari ikut serta dalam aksi-aksi kekerasan.” Karenanya, dalam maknanya yang terakhir, istilah ini fokus kepada aspek tindakan (*behavior*), yang berbeda dari istilah deradikalisasi yang merujuk kepada “delegitimasi prinsip-prinsip ideologis yang mendasari tingkah laku atau tindakan.” Hal ini penting dibedakan karena, tulis ketiga peneliti di atas, “sering ditemukan kasus di mana seseorang *disengage* (mengambil jarak dari tindakan kekerasan) tanpa sepenuhnya mengalami deradikalisasi” (2013: 755).

Jika situasi para ikhwan di atas diperbandingkan, tampak bahwa hanya Basri alias Bagong yang kembali terlibat dalam aksi-aksi kekerasan teroris. Basri melarikan diri dari penjara pada 2013, ikut dengan kelompok MIT pimpinan Santoso, dan belakangan, pada 14 September 2016, kembali tertangkap dan kini dipenjara. Tidak bisa diketahui secara pasti mengapa Basri kembali terlibat dalam aksi-aksi kekerasan teroris. Ketika Hwang, Panggabean, dan Ali-Fauzi mewawancarainya dulu, dia memang masih menyimpan dendam mendalam khususnya kepada Densus 88, yang dianggapnya menyiksanya ketika dia ditahan dan membunuh dua adik dan beberapa teman dekatnya pada peristiwa

¹⁹ Wawancara dengan Muhamad Fauzan Aرسال, 9 Januari 2019.

²⁰ Wawancara dengan Sofyan Djumpai, 2 September 2018.

Januari 2007. Waktu ditemui di penjara Ampana pada 2010, Basri sebenarnya terlihat rileks dan cukup bebas bergerak. Tentang mengapa dia kembali terlibat dalam aksi-aksi terorisme dengan mendukung kelompok MIT, sebagian narasumber menduga bahwa, sementara masih dendam, dia sebenarnya tidak berniat ikut kelompok MIT, tetapi tak ada seorang pun di Poso yang siap menampungnya dan menyembunyikannya karena takut menanggung risikonya.

Perkembangan menarik lain terjadi pada Arifudin Lako atau Iin Brur, yang sudah disebut di atas. Ketika pertama ditemui pada November 2009, dia baru saja menyerahkan diri ke Polda Palu sesudah tiga tahun menyembunyikan diri karena namanya masuk dalam DPO. Sesudah menyerahkan diri dan kasusnya diadili pada 2010, dia dijatuhi hukuman penjara delapan tahun, tetapi sudah bisa bebas bersyarat pada awal 2015 karena kelakuan baik. Fakta bahwa dia sendiri mengambil inisiatif untuk menyerahkan diri sudah menunjukkan bahwa dia sudah mengalami *disengagement* – proses yang sering disebut *self-disengagement* – tanpa perlu menjalani program deradikalisasi. Sesudah bebas, Iin Brur sibuk mengembangkan Komunitas Rumah Katu dan termasuk mantan ikhwan dan napiter yang rajin membangun kerjasama dengan komunitas Kristen di Tentena, pusat komunitas Kristen di Poso: “Bersama Rumah Katu, saya ingin menciptakan stigma positif untuk Poso. Selama ini Poso selalu dianggap tidak aman, sarang teroris, dan daerah konflik. Padahal hal tersebut sudah tidak ada lagi. Poso sudah menjadi daerah yang aman, damai, dan wajib dikunjungi,” kata Iin Brur.²¹

Di antara ikhwan atau mantan jihadis lain yang dulu sempat diwawancarai dan sudah *disengage*, kami juga sempat menjumpai Pian atau Sofyan Djumpai, yang sudah disebut di atas. Dia kini makin sibuk berbisnis, mengerjakan proyek-proyek pesanan pemerintah, seperti dulu ketika diwawancarai pertama kali. Banyak narasumber menyebutkan bahwa dia kini dekat dengan Aho, pengusaha keturunan Tionghoa yang dekat dengan bupati. Pian mengakui, kesibukannya kini justru menjauhkannya dari berpikir mengenai melakukan aksi-aksi kekerasan. Dia bahkan mengaku sudah makin jarang menghadiri acara-acara taklim, meskipun tetap menjalin silaturahmi dengan Ustaz Adnan. Istrinya kini adalah seorang guru dan anggota pegawai negeri.²²

5. Peran Perempuan dalam Mencegah Reradikalisasi

Penting juga secara khusus disebutkan di sini peran ibu dan istri para ikhwan atau mantan jihadis. Selain dengan berbagai cara menghambat reradikalisasi atau mempercepat deradikalisasi kelompok yang terakhir, mereka juga memainkan peran penting dalam menjauhkan anak-anak mereka dari berbagai jebakan kekerasan yang sama yang sudah menjerat orangtua mereka.

Salah satu contohnya adalah peran Mama Ete, ibunda Iin Brur. Mama Ete berhasil membujuk anaknya untuk menyerahkan diri dan meninggalkan lingkaran lamanya yang penuh kekerasan. Bagi Mama Ete, Iin Brur dan teman-temannya sebenarnya bukanlah teroris, melainkan hanya anak-anak muda yang merasa terpanggil untuk mempertahankan

²¹ Wawancara dengan Iin Brur, 2 September 2018.

²² Wawancara dengan Sofyan Djumpai, 2 September 2018.

wilayah dan agama mereka. Ketika Iin Brur akhirnya pulang ke rumahnya di Poso dari persembunyiannya di Palu, sebelum akhirnya menyerahkan diri ke Polri, dia menyambutnya dengan gembira: memeluk, mencium, dan memasak makanan kesukaan Iin Brur. Begitu pun setelah Iin Brur keluar dari penjara, Mama Ete membuat acara syukuran bersama tetangga dan teman-teman lama Iin Brur.²³ Penerimaan dan dukungan dari keluarga seperti ini sangat penting dalam proses *disengagement* seorang mantan napiter.

Contoh lainnya dapat dilihat dari tindakan beberapa istri yang suami mereka ditangkap atau ditembak mati oleh aparat kepolisian atas dugaan terorisme. Misalnya Umi Ati (bukan nama sebenarnya), istri seorang mantan napiter yang mengaku menjadi korban salah tangkap polisi dalam operasi Januari 2007. Dia mengaku, suaminya ditangkap karena kebetulan berada di lokasi di mana berlangsung baku tembak antara jihadis dan polisi – belakangan, mobil merahnya, yang menjadi tameng para jihadis, digunakan sebagai barang bukti untuk menangkapnya dengan tuduhan terorisme. Tiga hari setelah penangkapan, Umi Ati bersama anak-anak dan mertuanya mengunjungi sang suami di Palu. Di sana mereka menemui sang suami dalam kondisi mengenaskan: Matanya bengkak dan bagian-bagian tertentu tubuhnya babak belur, diduga karena proses interogasi yang disertai siksaan. Kondisi demikian membuat anaknya kesal dengan kepolisian, terutama anak keduanya, yang selalu tidak senang setiap kali aparat keamanan datang ke rumah. Meskipun begitu, Umi Ati selalu mengarahkan anak-anaknya untuk tidak menyimpan dendam dan mengikhhlaskan kemarahan tersebut karena Tuhan pasti memberikan ganjaran yang setimpal untuknya.²⁴

Hal serupa juga dilakukan Umi Dewi (bukan nama sebenarnya), istri pertama Basri, salah satu pemimpin MIT yang kini dipenjara. Suaminya itu sudah absen dari kehidupan Umi Dewi dan anak-anaknya sejak 2007 ketika dia pertama kali ditahan. Selang 3-4 tahun setelahnya, dia melarikan diri dan bergabung bersama MIT di Gunung Biru sebagai buron. Dia kembali ditangkap pada 2016 dan hingga hari ini mendekam di penjara berisiko tinggi di Nusa Kambangan. Basri bukan sama sekali melepaskan perannya sebagai ayah; dia tetap menjalin komunikasi terutama ketika berada dalam penjara. Umi Dewi berusaha mengisi kekosongan sosok ayah dalam kehidupan anak-anaknya dengan terus menjaga kedekatan dengan anaknya sehingga mereka tidak merasa diabaikan dan ditinggalkan.²⁵

Contoh lainnya lagi adalah Umi Hesti (bukan nama sebenarnya), yang ditinggal suaminya, seorang napiter, sejak 2015 hingga 2019. Suaminya ditangkap usai salat subuh di masjid tidak jauh dari rumahnya. Sebelum kepolisian membawanya, suaminya meminta pulang ke rumah untuk meminta izin kepada istri dan anak-anaknya. Kehidupan Umi Hesti setelahnya cukup memprihatinkan. Dia tidak memiliki keterampilan untuk bekerja, mobilitasnya juga terbatas karena harus menjaga tiga anaknya yang masih kecil. Dalam kehidupan yang serba terbatas ini, Umi Hesti menghimbau suaminya supaya jangan kembali lagi dalam jaringan lamanya. Dalam kunjungannya ke penjara pada 2015, dia

²³ Wawancara dengan Mama Ete, 8 Januari 2019.

²⁴ Wawancara dengan Umi Ati (bukan nama sebenarnya), 9 Januari 2019.

²⁵ Wawancara dengan Umi Dewi (bukan nama sebenarnya), 10 Januari 2019.

berkata kepada suaminya: “*Abi* [ayah], kalau misalkan ada teman-teman yang ikhwan-ikhwan begitu, umpamanya ajak ini, *enggak* usah-lah, *abi*. Karena cukuplah sampai di sini. Kasihan anak-anak *enggak* ada yang urus, cuma ada *umi*, *enggak* ada yang cari nafkah.”²⁶

Peran-peran terakhir ini diakui sangat strategis oleh Umi Aminah, salah satu istri mantan napiter yang kini mengelola majelis taklim Amanah khusus perempuan di Poso. Dia menekankan sekali pentingnya pendampingan psikologis kepada anak-anak yang terekspos kekerasan untuk mencegah radikalisasi mereka nantinya:

[Kondisi] psikologis anak ‘kan bisa terganggu. Mereka bisa tanya ke mana ayahnya. Ada kasus *kayak* anaknya si Maryam (nama samaran): anaknya [yang] polos, tidak tau apa-apa, tiba-tiba keluar kata-kata, “Polisi itu pembunuh.” Mengapa bisa terlontar seperti itu? Karena dia menyaksikan sendiri *abi* (ayah)-nya ditangkap. Seharusnya, dalam peristiwa penangkapan seperti ini, polisi juga harus mengobati mental anak ini. Supaya tidak timbul di pikirannya hal-hal yang negatif. Khawatirnya, anak-anak akan dendam dan tersimpan di masa depan. Justru dari sini bibit-bibit [radikalisme] bisa muncul.²⁷

Sayangnya, sejauh ini usaha pendampingan tersebut dilakukan secara sporadis oleh para ibu dan tanpa dampingan kelompok profesional.

IV. SISA DUKUNGAN KEPADA MIT: REKONSILIASI YANG BELUM PENUH

Di atas sudah disebutkan bahwa kelompok MIT kini kecil pengaruhnya di tingkat masyarakat Poso dan para pemimpinnya sudah berhasil dibunuh atau ditangkap. Di atas juga disebutkan bahwa jika ada, dukungan yang sedikit pun tidak bersifat ideologis, melainkan karena alasan kemanusiaan. Jika demikian, siapa atau kelompok mana saja yang masih potensial mendukung kelompok MIT di Poso? Kelompok mana saja yang masih rentan terkena pengaruh? Sejauh mana hal ini terkait dengan program-program reintegrasi yang sudah dijalankan, misalnya bantuan ekonomi? Di bawah ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena relevansinya yang cukup kuat, pada bagian ini kami juga akan mendiskusikan satu soal lainnya, yakni isu-isu nasional atau internasional yang memicu tumbuhnya ketegangan di Poso dan potensial dimanfaatkan kelompok-kelompok seperti MIT.

1. Sisa-sisa Dukungan Ideologis kepada Kelompok Teroris MIT

Beberapa narasumber menyebutkan bahwa pemimpin agama di Poso yang hingga kini masih sangat radikal dan tertutup adalah Ustaz Yasin, yang berperan penting dalam pembentukan JAT di Poso seperti disebutkan di atas. Jika masih ada dukungan ideologis kepada kelompok Santoso di Poso, sumbernya kemungkinan besar terkait dengan Ustaz Yasin ini, yang masih mengafirkan orang dan bercita-cita membangun Khilafah Islamiyah

²⁶ Wawancara dengan Umi Hesti (bukan nama sebenarnya), 8 Januari 2019.

²⁷ Wawancara dengan Umi Aminah, 15 Maret 2019.

di Indonesia.

Ustaz Yasin pertama kali masuk ke Poso dari Semarang pada fase awal konflik Poso, sebagai bagian dari tim dakwah JI, dan terus menetap di sana. Dia ditangkap setelah baku tembak dengan Polri pada Januari 2007, dihukum lima tahun penjara, tetapi sudah dibebaskan pada 2010. Ketika dipenjara di Lapas Petobo, Palu, dia mengadakan pengajian yang diikuti oleh beberapa orang yang belakangan menjadi pengikut MIT pimpinan Santoso. Lewat pengajian, dia mengajak para muridnya – termasuk penculik anak, pengedar narkoba, pencuri, pemerkosa dan pembunuh – untuk bertobat atas perbuatan mereka di masa lalu dan mulai mengajarkan tentang tauhid dan jihad.

Menurut satu laporan ICG (2012: 6 dan 9), ketika JI mulai tidak tertarik dengan *amaliyat* (operasi) baru di Poso, Ustaz Yasin mulai membahas kemungkinan mengaktifkan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), organisasi baru di bawah pimpinan Abu Bakar Baasyir yang menyempal dari JI, dengan almarhum Santoso. Sesudah bebas pada 2010, dia menyatakan ikut bergabung dengan JAT dan mendirikan cabangnya di Poso pada Januari 2011 dengan dia sendiri bertindak sebagai pimpinan (*amir*)-nya. Namun, pada November 2012, dia kembali ditangkap atas tuduhan penyembunyian para pelaku teror yang berada di Dusun Tamanjeka, Poso Pesisir, dan dipenjarakan.

Setelah bebas pada 2017, Ustaz Yasin kembali berdakwah di Poso untuk menanamkan doktrin yang radikal dan tertutup. Jika dulu lokasi utama dakwahnya adalah Masjid Al-Muhajirin di Kayamanya, Poso Kota, kini dia menggeser pusat dakwahnya ke lokasi yang tak jauh dari masjid di atas tetapi lebih tertutup, masih tetap di Kayamanya. Di tempat baru itu dia mendirikan musala dan pesantren, dan para ikhwan atau mantan jihadis yang masih setia kepadanya kerap mengikuti ceramahnya di situ. Menurut dugaan, jumlah santrinya di sana mencapai sekitar 25 orang, tetapi dia juga aktif di Pesantren Malino, yang didirikannya di Landangan, Poso Pesisir. Menurut narasumber yang mengamati dari dekat kiprah Ustaz Yasin, dia biasanya berkunjung ke pesantren tersebut sesudah salat subuh. Di pesantren itu, jumlah santrinya sekitar 23 orang, termasuk anak-anak Daeng Koro dan Santoso.²⁸

2. Kelompok-kelompok Rentan lain di Poso: Anak-anak Muda dan Perempuan

Selain Ustaz Yasin dan kelompoknya, yang mengkhawatirkan dari situasi di Poso belakangan ini adalah fakta bahwa dukungan kepada kelompok MIT Santoso justru diberikan oleh beberapa orang yang datang dari generasi yang lebih muda dibanding generasi ikhwan atau jihadis yang pertama atau generasi Iin Brur, Yono, atau Pian yang sudah disebutkan di atas. Masih harus dipastikan lagi apakah kelompok baru ini terkait langsung atau tidak dengan dakwah yang disampaikan Ustaz Yasin.

Salah satu contoh dari generasi baru ini adalah Mulyadi alias Zibair, yang ditangkap pada awal Februari 2015 karena terlibat mengantar keperluan logistik dan senjata api rakitan ke kelompok Santoso. Dia juga sempat berlatih militer di Gunung Benteng, Tambarana, di mana Santoso menjadi instruktur. Ketika ditangkap, Mulyadi baru berusia 24 tahun, yang artinya dia baru berusia tujuh tahun ketika konflik Poso meletus pada 1998.

²⁸ Wawancara dengan Abu Rahman (bukan nama sebenarnya), 9 Januari 2019.

Dia menjadi salah satu contoh kelompok rentan di kalangan masyarakat Poso, yang bisa terperosok mendukung kelompok MIT karena alasan masih mendendam terhadap konflik dan tidak punya penghasilan yang cukup untuk menopang hidup dirinya dan keluarganya.

Mulyadi memendam amarah yang besar kepada mereka yang membunuh sanak familinya dalam konflik Poso – termasuk bapak, paman, dan kakeknya pada 2000 dan 2001 – dan yang menjadikan hidupnya dan keluarganya penuh kesengsaraan. Akibat konflik, dia harus mengungsi ke Palu, bersama nenek dan ibunya yang sudah menjanda, dan empat saudaranya (kakaknya laki-laki; dan tiga adiknya, yang dua di antaranya perempuan). Sesampainya di Palu, dia melanjutkan sekolah dan lulus di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin. Setelah itu, pada 2006, dia dan keluarganya kembali ke Poso, kecuali kakaknya yang melanjutkan kuliah di Palu. Mulyadi sendiri langsung masuk ke Pesantren Amanah golongan putra, tetapi hanya bertahan untuk satu tahun. Menurut pengakuannya, dia berhenti sekolah karena dia tidak tega melihat ibunya bekerja sendirian. “Saya didatangi sama [oleh] Ustaz ... , dan disuruh datang [kembali ke sekolah]. Saya bilang, tidak usah kasihan. Saya mau bantu orangtua... Jadi [saya] didatangi ustaz-ustaz terus dan saya sembunyi,” kisahnya.²⁹ Tetapi, meskipun dia rajin bekerja dan gonta-ganti pekerjaan secara serabutan, usahanya tidak mendatangkan penghasilan yang cukup karena dia tidak punya keterampilan dan sumberdaya yang cukup untuk itu. Dari situlah dia mulai menjalin hubungan dengan jaringan yang memiliki kaitan dengan Santoso, ikut pengajian, sampai kemudian memperoleh panggilan dari Santoso, yang belakangan dibantunya. Proses ini memerlukan waktu cukup lama, setidaknya dari 2011 hingga 2015, ketika Mulyadi akhirnya ditangkap.

Selain Mulyadi, contoh lain pendukung kelompok MIT Santoso yang berusia muda adalah warga Tamanjeka bernama Muhammad Faisal alias Namnung alias Kobar. Kami memperoleh informasi mengenainya dari Muhammad Sambara, Kadus Tamanjeka yang sudah disebut di atas. Usia Namnung sekitar 20-an tahun ketika dia bergabung bersama kelompok MIT Santoso pada 2012 dan namanya masuk ke dalam DPO setelah peristiwa pembunuhan dua polisi di Tamanjeka pada tahun itu juga. Nenek Namnung adalah sepupu Kadus Sambara. Ketika Namnung berusia tiga tahun hingga tamat SD, dia tinggal bersama Sambara. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di satu pesantren di Malino yang dipimpin Ustaz Yasin, namun tidak sampai selesai untuk alasan yang tidak jelas. Tetapi kemudian dia tinggal bersama saudara ibunya, istri Ali Sanang, yang adalah seorang anggota kelompok MIT pimpinan Santoso.³⁰

Masih terkait dengan butir di atas, yakni soal usia muda dan kemungkinan dukungan kepada kelompok MIT, penting dilaporkan di sini satu pertemuan bertema “Kampanye Perdamaian di Sekolah: Belajar Bersama Menjadi Generasi Tangguh” di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Poso, pada 1 September 2018.³¹ Dalam pertemuan itu,

²⁹ Wawancara dengan Mulyadi, 1 September 2018.

³⁰ Wawancara dengan Muhammad Sambara, 14 Maret 2019. Menurut informasinya, di Tamanjeka juga ada beberapa contoh napiter lain yang ditangkap karena mendukung kelompok MIT, yang hingga kini masih dipenjara (Samil, Soleh, Ihsan Maulana, dan Zumri), yang rata-rata usianya 20-an hingga 30-an tahun. Kebanyakan mereka masih punya ikatan keluarga, misalnya Ali Sanang dengan Rodik, Rapli, dan Namnung.

³¹ Acara ini dikelola Aliansi Damai Indonesia (AIDA), satu LSM di Jakarta yang bergerak dalam

para siswa dipertemukan dengan dua korban aksi terorisme (Bom Marriott dan Bom Bali) dan seorang mantan anggota JI yang sudah *disenggage*, yang menyampaikan kesaksian mereka mengenai bahaya terorisme. Ketika dibuka kesempatan tanya-jawab, dua orang siswa berani angkat tangan dan minta waktu untuk meminta maaf, sambil menangis, kepada kawan-kawannya karena orangtua mereka dulu sempat terlibat dalam konflik kekerasan. Ketika menyampaikan kisah yang berujung pada permintaan maaf ini, pilihan kata yang digunakan melibatkan kata-kata yang mengundang citra kekerasan, bahkan horor, seperti “potong” (artinya: membunuh). Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak itu, yang kini masih duduk di bangku sekolah menengah atas, kemungkinan besar mendengar apa yang pernah terjadi di wilayah mereka dari keluarga atau teman mereka. Ini memperlihatkan bahwa mereka juga adalah kelompok rentan yang sangat bisa dipengaruhi oleh narasi konflik kekerasan.³²

Selain itu, dukungan kepada kelompok Santoso kemungkinan bisa juga datang dari mereka yang merasa harus membantu kelompok itu dengan alasan solidaritas dan perasaan sedikit ancaman dituduh “banpol” (“pembantu polisi” alias informan). Mereka berfungsi sebagai kurir, yang dikontak dan dibayar lebih untuk menyiapkan bahan makanan dan lainnya, termasuk senjata, kepada kelompok Santoso. Salah satu contohnya adalah Ramdhan alias Andang, yang ditangkap dengan alasan ini pada 2015 (lihat lebih jauh di bawah). Hal ini juga dialami Mulyadi, yang sudah disebut di atas, yang merasa tidak bisa berhenti sekali dia sudah ikut membantu kelompok MIT itu: “Saya mau berhenti langsung tiba-tiba, [tetapi] yang saya khawatirkan [adalah] jangan-jangan [saya] sudah menjadi Banpol, [dan] akan diancam. Hukumannya berat kalau sudah di-“banpol”-kan, masuk dalam kategori “murtad” dalam istilah agama [yang boleh dihukum mati].”³³ Fadli, seorang petani di Desa Padang Lembara, Poso, yang juga salah seorang kawan Andang dan Mulyadi, tewas dipenggal kepalanya oleh lima orang tidak dikenal yang menuduhnya sebagai mata-mata polisi pada 18 September 2014. Sebelum mengeksekusi korban, para pelaku sempat mengeluarkan kata-kata kepada istri korban yang menjelaskan alasan perbuatan mereka: “Ini risiko menjadi mata-mata polisi dan gara-gara kamu dua teman saya meninggal di sini,” kata mereka seperti ditudurkan kembali oleh sang istri.³⁴

Akhirnya, kelompok rentan lain yang luput dari pendampingan dalam proses reintegrasi di Poso adalah kelompok perempuan, terutama para istri napiter, yang selalu berada dalam posisi tidak mudah. Beberapa istri napiter berasal dari luar Poso dan hanya mengandalkan suami sebagai tulang punggung utama keluarga. Ketika suami mereka ditangkap atau ditembak mati, mereka kehilangan arah dan tidak memiliki modal

membangun perdamaian dengan mempertemukan mantan pelaku dan penyintas aksi kekerasan teroris, dengan Iin Brur sebagai mitra lokalnya.

³² Tidak terlalu jelas mengapa acara itu tidak melibatkan mantan pelaku dan korban Muslim dan Kristen di Poso sendiri sebagai narasumber. Hal ini sebenarnya dimungkinkan karena mereka sendiri terlibat menyiapkan acara itu sebagai mitra lokal, seperti Iin Brur. Jika terlibat, kesaksian mereka kemungkinan besar akan lebih menyentuh. Selain itu, mungkin akan lebih kondusif juga jika pertemuan diadakan di tempat yang lebih tenang, sehingga para siswa bisa lebih bebas dan nyaman menyampaikan perasaan dan pikiran mereka, tidak di gedung sekolah yang ramai dan panas.

³³ Wawancara dengan Mulyadi, 1 September 2018.

³⁴ Lihat “Seorang Petani di Poso Dipenggal karena Dituding Beri Informasi ke Densus 88,” *DetikNews.com*, 21 September 2014, <https://news.detik.com/berita/2696434/seorang-petani-di-poso-dipenggal-karena-dituding-beri-informasi-ke-densus-88?n991102605> (diakses 14 April 2019).

psikologis maupun finansial yang cukup untuk menghidupi diri dan anak-anak mereka. Berkenaan dengan hal itu, Umi Aminah, istri Ustaz Hasanudin, mantan napiter yang sudah sempat disinggung di atas, berpendapat:

Suami [ikhwan atau mantan jihadis] ini merasa punya kekuasaan besar, tetapi kadang mereka menyalahgunakannya. Di satu sisi mereka tidak lihat kondisi istrinya, mereka tidak mau mengerti bagaimana kalau mereka [para istri itu] ditinggal... [Kita] kembali ke agama. Kalau dia masih dalam rambu-rambu kita ikuti, tetapi kalau tidak ya [kita] tinggalkan. Itu 'kan aturannya sudah jelas. Kalau dalam Islam, jika seorang istri merasakan tekanan lahiriah dan batiniah, itu berarti sudah kekerasan terhadap perempuan.³⁵

Satu contoh istri yang jadi korban kondisi seperti ini adalah Umi Hayati (bukan nama sebenarnya). Suaminya, yang berprofesi sebagai pencari kayu dan berperan sebagai kurir kelompok MIT, ditembak mati dalam operasi penegakan hukum pada 2014. Setelah peristiwa itu, jenazah suaminya dibawa ke Palu dan dia hanya mendapat kabar bahwa suaminya telah meninggal dari keluarganya. Umi Hayati lalu minta agar jenazah suaminya dikembalikan ke Poso untuk dikuburkan di dekat rumah mertuanya. Namun, ketika tiba di rumahnya, dia menemukan jenazah suaminya sangat mengenaskan: "Pokoknya *kayak* diiris-iris begitu, di tangannya, di sininya [perut]... luka, *kayak* diiris pisau atau apa. Pokoknya mukanya itu sudah *enggak* [utuh lagi]... Ini robek, itu robek... [me]-ngeri-[kan] pokoknya."³⁶

Kemarahan Umi Hayati di atas bisa menjadikannya – atau anak-anaknya dan keluarga dekatnya – termasuk ke dalam kelompok rentan yang disusupi legitimasi ideologis untuk mendukung kelompok teror. Umi Hayati cukup beruntung karena memiliki sanak saudara yang memberikan dukungan moral maupun material selama berada dalam situasi duka tersebut. Dia belakangan tinggal bersama orangtuanya, karena almarhum suaminya belum sempat menyelesaikan pembangunan rumah mereka. Kebutuhan sehari-harinya dan anak perempuan semata wayangnya tercukupi dari berjualan sembako milik keluarga. Dia selama ini belum menerima bantuan apa pun dari pemerintah atau pihak lainnya. Baru pada 2018 lalu dia menerima bantuan dari Polres Poso, melalui Bhabinkamtibmas Tabalu, Poso Pesisir, yang membantu pembangunan rumahnya hingga selesai.

3. Reintegrasi: Masalah Bantuan Ekonomi

Rekonsiliasi di Poso juga belum berlangsung penuh karena berbagai tantangan terkait dengan reintegrasi para kombatan dan bantuan ekonomi kepada para ikhwan dan kelompok rentan. Seperti sudah disebutkan di awal, proses reintegrasi dimaksudkan antara lain untuk membantu para kombatan agar bisa kembali hidup normal sebagai warga biasa yang mengandalkan keahlian atau ketrampilan non-kombatan untuk hidup. Tetapi masalah ini sangat rumit di Poso, seperti ditunjukkan misalnya oleh McRae (2009): konflik kekerasan di Poso terjadi di Poso sendiri, sehingga para kombatan sebenarnya

³⁵ Wawancara dengan Umi Aminah, 15 Maret 2019.

³⁶ Wawancara dengan Umi Hayati (bukan nama sebenarnya), 8 Januari 2019.

tidak perlu meninggalkan pekerjaan semula mereka untuk pergi berperang (ke tempat lain dan meninggalkan pekerjaan) jika mereka pada mulanya memiliki pekerjaan. Masalahnya, tidak semua mereka punya pekerjaan ketika konflik kekerasan terjadi, dan ini memperumit masalah reintegrasi di Poso.

Sekalipun penting untuk memahami rumitnya reintegrasi masyarakat Poso pascakonflik, masalah di atas tidak akan dibahas lebih jauh di sini. Tujuan kami lebih terbatas, yakni menunjukkan bahwa proses reintegrasi terhambat karena kurang memadainya bantuan ekonomi kepada kelompok-kelompok rentan. Bantuan ini kurang memadai karena tiga alasan. Pertama, sementara bantuan ekonomi yang disediakan beragam jenisnya dan disampaikan oleh pihak-pihak yang berbeda, tidak ada koordinasi di antara pihak-pihak yang memberikan bantuan ini. Kedua, karena tidak ada koordinasi, jumlah total bantuan yang ada bisa disebut sedikit jumlahnya, bersifat *ad hoc*, dan dengan sebaran tidak merata. Ketiga, karena dua kelemahan barusan, tidak semua kebutuhan ekonomi kelompok rentan tertangani, dan dalam beberapa kasus pemberian bantuan bahkan menimbulkan kecemburuan.

Masalah tidak adanya koordinasi dalam penyaluran bantuan adalah masalah lama (lihat McRae, 2009; Hwang, Panggabean, dan Ali-Fauzi, 2013) yang tampaknya tidak juga dapat diselesaikan hingga hari ini. Menurut Fuad Amhar, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Poso, banyak terjadi miskordinasi terkait bantuan ekonomi ini, baik di antara lembaga-lembaga pemerintah yang berbeda, seperti dinas sosial dengan Polres, maupun di antara cabang-cabang Kementerian Sosial (di pusat) dan Dinas Sosial (di daerah/kota). Hal ini terlihat dari beragamnya program yang ditujukan misalnya kepada napiter atau mantan napiter, namun semuanya tidak menggunakan basis data yang sama.³⁷

Karena alasan di atas, ada kemungkinan bahwa seorang napiter mendapat bantuan dari dua atau lebih sumber sekaligus. Begitu pun sebaliknya, ada kemungkinan seorang napiter tidak mendapat bantuan sama sekali.

Dalam lima tahun terakhir, kasus-kasus bantuan ganda misalnya ditemukan dalam program yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) di pusat dan Departemen Sosial di tingkat kota/kabupaten. Pada 2017, Bidang Rehabilitasi Sosial (Resos) melaksanakan program Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang berasal dari APBD Kota Poso. Ada empat kelompok yang mendapat bantuan dari program ini dan masing-masing mendapatkan bantuan sebesar 15 juta rupiah. Pada 2018, Bidang Resos Kemensos juga memberikan bantuan kepada para mantan napiter berupa uang sebesar lima juta rupiah, yang ditransfer ke 50 orang di seluruh Indonesia, dengan 35 orang di antaranya berasal dari Poso. Sementara itu, Kemensos melalui bidang lain, yakni bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), bekerjasama dengan BNPT, meluncurkan program bantuan kepada 40-50 orang keluarga mantan napiter, yang masing-masing memperoleh bantuan 15 juta rupiah.

Selain Kemensos, Polres Poso juga mengerahkan sejumlah besar dana untuk

³⁷ Wawancara dengan Fuad Amhar, 9 Januari 2019.

membantu reintegrasi mantan napiter, tanpa berkonsultasi dengan pihak-pihak lain di atas. Menurut Wakapolres Poso, Gede Swara, ada 13 orang mantan napiter yang terafiliasi dengan MIT yang diberikan bantuan modal usaha dengan jumlah 25-30 juta per orang bagi yang membuka kios dan 80-100 juta rupiah bagi yang membuka usaha ayam petelur.³⁸ Kami sempat berkunjung ke salah satu penerima bantuan ini, Mulyadi, yang menjalankan usaha depot air minum isi ulang Khoirunnisa di Desa Masamba, Kecamatan Poso Pesisir, yang peresmiannya dilakukan oleh Kapolres Poso pada Mei 2018.³⁹

Adanya masalah koordinasi dalam pemberian bantuan ini juga diakui Budiman Maliki, yang sebelum bertugas di KPU adalah Ketua Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS) di Poso dan ikut membantu proses penyaluran bantuan kepada para ikhwan. Menurut catatannya, dalam data penerima program Kemensos PSKBS-BNPT tahun 2018, ada 15 nama mantan napiter yang sudah mendapat bantuan dari program lainnya.⁴⁰ Ini menunjukkan tidak adanya sinkronisasi basis data maupun koordinasi di antara berbagai lembaga dalam penyaluran bantuan reintegrasi napiter.

Masalahnya menjadi lebih rumit lagi jika bantuan dari lembaga-lembaga non-pemerintah, misalnya LSM, ikut dipertimbangkan di sini. Salah satu jenis bantuan yang dimaksudkan untuk bertahan dalam jangka panjang adalah bantuan dalam bentuk pinjaman sangat lunak yang disalurkan lewat Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Inilah yang dilakukan satu LSM di Jakarta, dengan menyediakan dana sebesar dua juta rupiah kepada 30 mantan napiter dan ikhwan di Poso Kota, Poso Pesisir, dan Lawanga. Masing-masing penerima diharapkan untuk mengembalikan dana pinjaman dalam waktu delapan bulan, agar dana yang ada bisa disalurkan kepada mereka yang belum menerima.⁴¹

Karena alasan-alasan di atas, bantuan yang ada kadang dirasa terlalu kecil untuk membangun usaha yang bisa bertahan dalam jangka panjang dan tidak terbagi secara merata. Hal ini menumbuhkan kecemburuan dan kesalingcurigaan. “Jadi memang ada kekecewaan. Tentu ‘kan mereka saling cerita. Itu yang menurut saya ... ke depannya memang harus ada sinergisitas,” simpul Budiman.⁴²

Kecemburuan akibat tidak meratanya bantuan ini diutarakan oleh seorang istri mantan napiter, Umi Ati. Dia protes karena bantuan banyak diberikan kepada mantan napiter yang baru keluar dari penjara, sementara suaminya yang dipenjara pada 2007 hanya mendapat sedikit bantuan. “Mereka [baru saja] keluar [dari penjara] sudah bangun rumah. [Sementara] kita masih begini, begini saja, rumah belum jadi,” katanya.⁴³ Umi Ati dan keluarga merupakan salah satu penerima bantuan program PSKBS-BNPT untuk pembelian alat usaha. Menurutnya, jumlah dana yang diberikan tidak cukup sebagai modal usaha mebel. Lagipula, dia sudah memiliki alat perkakas dan lebih membutuhkan

³⁸ Wawancara dengan Gede Swara, 2 September 2018.

³⁹ Lihat juga “Eks Napiter Poso Diberi Usaha Depot Air Minum,” *Sultengraya.com*, 11 Mei 2018, <https://sultengraya.com/59523/eks-napiter-poso-diberi-usaha-depot-air-minum/> (diakses 20 Januari 2019).

⁴⁰ Wawancara dengan Budiman Maliki, 8 Januari 2019.

⁴¹ Wawancara dengan Yono, yang ikut mengelola BMT yang menyalurkan dana, 10 Januari 2019.

⁴² Wawancara dengan Budiman Maliki, 8 Januari 2019.

⁴³ Wawancara dengan Umi Ati (bukan nama sebenarnya), 8 Januari 2019.

kayu sebagai bahan utama usahanya, tetapi barang ini tidak bisa diklaim dalam model bantuan yang ada.

Selain itu, bantuan seperti dikhususkan kepada mantan napiter, padahal banyak mantan ikhwan yang juga menghadapi masalah, meskipun mereka tidak pernah dipenjara. Di tengah masyarakat umum, ada kelompok-kelompok rentan yang tidak mesti mantan napiter tetapi dulu terlibat dalam konflik Poso yang kini menghadapi masalah ekonomi. Salah satunya adalah kawan baik Andang, yang sempat kami temui ketika berkunjung ke ladang peternakan ayam milik Andang. Merujuk ke pengalaman kawannya itu, Andang bertanya, “Apakah seseorang harus menjadi napiter dulu sebelum bisa menerima bantuan?”⁴⁴

4. “Gangguan” Akibat Isu-isu Nasional dan Internasional

Sementara banyak aktivitas para ikhwan dan jihadis, bahkan napiter, makin terintegrasikan ke dalam politik formal pada tingkat lokal di Poso, isu-isu politik Jakarta atau terkait dengan perpolitikan nasional terus mempengaruhi politik lokal. Salah satu bentuk pengaruh itu adalah meningkatnya ketegangan sosial dan politik di Poso, yang bisa jadi disusupi atau ditunggangi oleh kepentingan kelompok teroris.

Salah satu contohnya adalah demonstrasi damai sekitar 100 orang untuk mendukung gerakan “Tahun 2019 Ganti Presiden” di halaman Masjid Raya Kota Poso, 31 Agustus 2018, yang sempat salah satu dari kami hadiri. Aksi itu dikelola Front Pembela Islam (FPI) dan menampilkan orasi Ustadz Sugianto Kaimudin, tokoh Poso yang kebetulan juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPI Sulawesi Tengah. Penting juga dicatat di sini bahwa FPI DPD Sulawesi Tengah juga adalah pihak yang membantu para istri napiter terkait MIT ketika mereka mengadukan nasib mereka ke DPRD Poso, termasuk istri Mulyadi dan Andang, pada 22 April 2015.⁴⁵

Isu nasional lain yang sempat menimbulkan ketegangan di Poso adalah isu pembakaran “bendera Tauhid”, menyusul pembakaran bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Garut, Jawa Barat, dalam peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2018. Perlu diingat, oleh ketiga anggota Banser ini, bendera itu dianggap bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi kemasyarakatan yang telah dilarang karena bercita-cita mendirikan sistem khilafah di Indonesia. Seperti terjadi di banyak wilayah lain di Indonesia, aksi pembakaran bendera oleh Banser ini juga diprotes beberapa segmen masyarakat Muslim di Poso pada Jumat, 26 Oktober 2018, dalam aksi tandingan berlabel aksi “bela Tauhid”. Bedanya, aksi di Poso berkelanjutan dan menegangkan karena ada pemberitaan mengenai penurunan bendera merah putih di depan Kantor DPRD Poso pada saat berlangsungnya aksi tandingan ini, dan pengibarannya “bendera Tauhid” sebagai penggantinya, yang menimbulkan pro dan kontra.⁴⁶

⁴⁴ Wawancara dengan Ramdhan atau Andang, 1 September 2018.

⁴⁵ Lihat “Datangi DPRD, Ini Permintaan Para Istri Tertuduh Kelompok Santoso,” *Kiblat.net*, 24 April 2015, <https://www.kiblat.net/2015/04/24/datangi-dprd-ini-permintaan-para-istri-tertuduh-kelompok-santoso/> (diakses 10 April 2019).

⁴⁶ Wawancara dengan Ismail Ibrahim, Sekretaris Komisariat Daerah (Komda) Alkhairaat Poso, yang menjabat juga sebagai Wakil Sekretaris MUI Poso dan Wakil Ketua FKUB Poso, 12 Maret 2019.

Isu di atas baru mereda ketika Kapolres Poso menegaskan beberapa hal yang dia peroleh dari hasil olah TKP pihak kepolisian: (1) tidak ada penurunan bendera merah putih di depan Gedung DPRD Poso, tempat aksi protes diselenggarakan; (2) pada saat aksi berlangsung, pihak dewan memang tidak memasang atau mengibarkan bendera merah putih, yang sedang diperbaiki karena rusak; dan (3) “bendera Tauhid” warna hitam memang sempat dikibarkan di sana, tetapi kemudian segera diturunkan, berkat negosiasi sejumlah aparat keamanan dengan peserta aksi. Ketegangan di Poso akibat aksi-aksi di atas direkam media massa. Salah satu laporan mengutip seseorang: “Kita ini ‘kan di Poso sudah aman-aman, jangan dibuat provokasi melalui pemberitaan yang tidak sesuai fakta di lapangan,” ucapnya.⁴⁷

Dua contoh kasus di atas menunjukkan meningkatnya ketegangan di Poso akibat isu-isu yang berkembang di tingkat nasional, yang bisa saja dimanfaatkan oleh kelompok teroris MIT untuk menunjang kepentingannya sendiri. Di atas sudah disebutkan bagaimana kelompok ini, ketika masih dipimpin Santoso, memanfaatkan momen berdirinya ISIS di Suriah dan “pemberontakan” para napiter di Mako Brimob, Depok, sebagai kesempatan untuk memperkokoh eksistensinya yang penting di Poso, sambil memerintahkan para pengikutnya di seluruh Indonesia untuk mengadakan *amaliyat* yang mungkin di masing-masing tempat.

V. LANGKAH-LANGKAH BINADAMAI

Di atas sudah dilaporkan beberapa faktor yang mempersulit atau tidak memungkinkan terjadinya proses reradikalisasi masyarakat Poso, meskipun rekonsiliasi di antara mereka belum berlangsung penuh. Di bawah ini kami akan khusus melaporkan beberapa langkah binadamai oleh pihak pemerintah atau non-pemerintah yang kami anggap penting untuk dicatat. Langkah-langkah ini bersifat strategis untuk berlangsungnya perdamaian di Poso dalam jangka panjang. Empat sektor khusus akan kami laporkan dan bahas di bawah ini: (1) langkah-langkah pemolisian yang makin sigap; (2) model pendidikan Islam yang makin terbuka; (3) aktivisme lintas-iman yang makin kuat; dan (4) aktivitas perempuan yang makin meningkat.

1. Langkah-langkah Pemolisian

Menurut banyak narasumber, Polres Poso, yang membawahi 19 Polsek, beberapa tahun belakangan ini tampak makin sadar dan sigap dalam memainkan peran pemolisian mereka. Menurut beberapa narasumber di kalangan pemerintah lokal maupun masyarakat sipil, kepemimpinan Kapolres AKBP Bogiek Sugiyarto, yang mulai menjabat sejak 4 Januari 2017, sangat baik: dia antisipatif dengan berbagai kemungkinan perkembangan; dia dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat; dan dia memberi perhatian yang cukup kepada para ikhwan, bahkan mantan napiter. Sebelum memimpin Polres Poso, dia memang pernah menjabat sebagai Wakapolres Poso antara 2012 dan 2015. Menurut satu sumber di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kapolres Poso bahkan sempat mengontak

⁴⁷ Lihat “DPRD Poso Pastikan Aksi Penurunan Bendera Merah Putih di Poso Tidak Benar,” *KabarSelebes.id*, 28 Oktober 2018, <https://www.kabarselebes.id/2018/10/dprd-poso-pastikan-aksi-penurunan-bendera-merah-putih-di-poso-tidak-benar/> (diakses 10 April 2019).

beberapa ahli dari universitas itu untuk mengembangkan satu program reintegrasi berbasis kelompok perempuan di Poso, yang hingga kini masih disiapkan.

Sigapnya pemolisian di Polres Poso antara lain tampak dari fakta bahwa mereka cukup antisipatif menyambut napiter dari wilayah Poso yang baru saja atau segera akan keluar terkait dengan dukungan mereka terhadap kelompok MIT. Ketika kami berkunjung ke kantor Polres pada September 2018, dinding ruang bagian dalam kantor itu dipenuhi gambar atau tulisan dengan judul “Antisipasi Terorisme di Masa yang akan Datang,” termasuk lima butir yang dianggap “Potensi Gangguan/Akar Masalah Gangguan Kamtibmas Wilayah Kabupaten Poso 5 Tahun ke Depan.” Dua di antara lima butir itu menyebutkan puluhan orang yang tinggal di Poso yang akan segera keluar dari penjara karena dukungan mereka kepada MIT dan ratusan lainnya yang pernah menjadi simpatisan.

Di atas juga sudah disebutkan bantuan yang diberikan Kapolres Poso kepada mantan napiter tertentu seperti Mulyadi, yang dinilai banyak narasumber sebagai contoh bantuan ekonomi yang berhasil. Menurut Mulyadi, usahanya kini berkembang memuaskan dan dia sibuk mengantarkan galon air mineral ke tempat-tempat yang makin jauh.⁴⁸ Perkembangan usaha Mulyadi ini sejalan dengan tujuan Kapolres agar bantuan yang diberikan memiliki dampak jangka panjang. Menurut Iin Brur, Kapolres juga sedang mempersiapkan yayasan yang bisa menampung dan mengelola dana untuk keperluan reintegrasi mantan napiter, karena dana yang diperlukan untuk itu tidak kecil dan selama ini hanya ditangani secara *ad hoc* oleh Polres Poso. Iin Brur mengaku diajak terlibat sebagai salah satu pengurus di yayasan itu, yang antara lain akan diurus juga oleh tokoh seperti Ustadz Adnan.⁴⁹

Langkah pemolisian yang sangat penting lainnya adalah mendekatkan hubungan polisi dengan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok rentan di wilayah-wilayah seperti Tamanjeka dan Kayamanya, termasuk para istri atau janda mantan jihadis atau napiter. Di atas kami sudah menyinggung kedekatan Bapak Andi, salah satu Kanit Binmas di Poso Pesisir, dengan warga yang tinggal di Tamanjeka. Tetapi kami juga sempat menyaksikan kedekatan yang sama antara anggota Polri dengan anak-anak Imran alias Genda, napiter yang masih dipenjara karena terlibat mendukung MIT, di lingkungan mereka di Poso Pesisir. Ketika petugas polisi itu datang ke rumah mereka, ketiga anak napiter itu datang mendekat, menunjukkan keakraban mereka. Dari kepala sekolah tempat dua dari tiga anak itu belajar (lihat lebih jauh di bawah), kami juga memperoleh informasi bahwa biaya sekolah mereka ditanggung oleh anggota polisi tersebut dengan dana dari Polres Poso.⁵⁰

Di Kayamanya, petugas Polri juga sudah mulai berhasil menjalin hubungan dengan Ustadz Yasin, meskipun yang bersangkutan masih sangat tertutup dan para pengikutnya masih penuh kecurigaan. Selain merupakan perkembangan positif, hal ini juga mengandung risiko, karena sebelumnya masyarakat di situ sangat antipati terhadap Polri, “khususnya terhadap Densus 88.” Lanjut Moh. Saiful, Bhabinkamtibmas yang bertugas di sana:

⁴⁸ Wawancara dengan Mulyadi, 1 September 2018. Mulyadi juga menceritakan bahwa dia sudah bisa mengontak langsung Kapolres Poso sejak dia masih ditahan di dalam penjara, ketika dia meminta bantuan Kapolres terkait kesehatannya dan harus berobat ke rumah sakit.

⁴⁹ Wawancara dengan Iin Brur, 2 September 2018.

⁵⁰ Wawancara dengan Sairin, 2 September 2018.

“Saya salat [bersama mereka] dengan memakai seragam dinas. Dalam pikiran saya, saya salat dan tidak mungkin mereka membunuh saya dalam keadaan ini, dan yang kedua, tujuan saya baik.”⁵¹ Untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat setempat, dia antara lain mengadakan kegiatan perpustakaan keliling, bekerjasama dengan dinas perpustakaan setempat.⁵²

2. Pengarusutamaan Model Pendidikan yang Terbuka

Langkah-langkah penting lain menuju Poso yang makin damai adalah berkembangnya model pendidikan Islam yang lebih terbuka dan tidak lagi menutup diri seperti sebelumnya. Hal ini tampak dari perkembangan terakhir Yayasan Wakaf Amanatul Ummah (YWAU), sebuah yayasan Islam di Tanah Runtuh yang dikelola Ustaz Adnan Arsal dan keluarganya. Khusus dalam bidang pendidikan, yayasan ini menaungi beberapa lembaga pendidikan, dari Pondok Pesantren Amanah Putra dan Putri, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), yang tersebar di wilayah Poso Kota dan Poso Pesisir. Mengingat posisi sentral yayasan ini dan pengasuhnya dalam sejarah konflik Poso yang lalu, hal ini merupakan perubahan besar. Ketika menceritakan kecurigaan banyak orang, termasuk pemerintah, kepada pesantrennya dulu, Ustaz Adnan menirukan ucapan Jusuf Kalla kepadanya pada suatu kali, dengan nada penuh kegetiran: “Pemerintah tidak bisa membangun pesantrenmu, karena [pesantren] kalian pesantren teroris!”⁵³

Kini Ustaz Adnan sendiri yang memimpin yayasan itu untuk bersikap makin terbuka. Dia bahkan mendorong sekolah-sekolah di bawah yayasannya untuk mengikuti berbagai kegiatan Kementerian Agama (Kemenag), misalnya lomba Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) dan turunannya di antara pondok-pondok pesantren se-Sulawesi pada Agustus 2014. Menurut pengakuannya, itu adalah kali pertama Pondok Pesantren Amanah, salah satu unit sekolahnya, ikut serta dalam ajang lomba dua tahunan yang diadakan Kemenag. Selain itu, dalam berbagai kesempatan, pertemuan YWAU juga melibatkan unsur-unsur dari Pemda dan DPRD Poso, Polres Poso, Komando Distrik Militer (Kodim) Poso, dan para tokoh pimpinan organisasi masyarakat dan agama setempat.⁵⁴

Dalam arah yang sama, Ustaz Hasanudin, yang menjabat sebagai wakil ketua yayasan, mulai mengembangkan bidang pendidikan di sana melalui kerjasama dengan ormas-ormas Islam lain di Poso seperti Muhammadiyah, Al-Khairaat, dan MUI. Dia juga punya rencana mengadakan kegiatan pesantren di wilayah-wilayah mayoritas non-Muslim seperti Tentena. Dia mengatakan ingin menghubungi Pendeta Damanik, salah satu pemimpin Kristen di Tentena, agar santri-santri Pondok Pesantren Amanah bisa

⁵¹ Wawancara dengan Moh. Saiful, 9 Januari 2019.

⁵² Lihat “Perpustakaan Keliling Oleh Bhabinkamtibmas Kayamanya Sentral Mendapatkan Respon Positif,” *TribataNews*, 25 Juli 2017, <http://tribatanews.polri.go.id/?p=234561> (diakses 10 Februari 2019).

⁵³ Wawancara dengan Muhammad Adnan Arsal, 3 September 2018.

⁵⁴ “Yayasan Amanatul Ummah Berkhidmat untuk Muslim Poso Sejak Tahun 1998,” *Kiblat.net*, 4 Februari 2016,

<https://www.kiblat.net/2016/02/04/yayasan-amanatul-ummah-berkhidmat-untuk-muslim-poso-sejak-tahun-1998/> (diakses pada 10 Januari 2019).

membuat kegiatan di sana.⁵⁵

Pentingnya perubahan di atas kami lihat sendiri pengaruhnya di Tabelo, Poso Pesisir, di mana beroperasi SDIT Permata Islam yang didirikan Ustaz Sairin, tokoh agama setempat dan kawan baik Ustaz Adnan. Berdiri pada 2009 dan berada di bawah payung besar YWAU asuhan Ustaz Adnan, sekolah itu terbuka untuk dimasuki murid dari unsur mana saja dan menerima donasi dari pihak mana saja, termasuk BNPT dan perusahaan-perusahaan swasta. Mungkin karena kedekatan hubungan tradisional mereka dengan pengasuh sekolah, banyak ikhwan dan mantan jihadis atau napiter di Poso yang mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah di sini. Selain karena alasan ini, SDIT juga dipilih karena besaran biaya sekolahnya bisa dinegosiasikan dan anak-anak napiter atau mantan napiter di situ dijamin tidak akan diolok-olok karena situasi orangtua mereka, seperti biasa ditemukan di sekolah-sekolah lain.

Dalam posisi seperti di atas, lembaga-lembaga pendidikan seperti SDIT menjadi agen yang turut menghambat reradikalisasi masyarakat Poso. Ketika kami berada di sana, Ustaz Sairin menceritakan kegundahannya karena dua anak Genda, napiter yang sudah disinggung di atas, tidak lagi mau sekolah di sana karena alasan yang tidak jelas meskipun segala biaya sekolah mereka sudah ditanggung Polres Poso. Dia gundah karena konon kedua anak itu akan dipindahkan ke pesantren di Malino yang diasuh Ustaz Yasin:

Itu ya, terkait anaknya Genda.... Yang saya sesalkan sekarang ini, maksudnya apa? ... Bagaimana upaya kita ini dari Kepolisian [dan] dari TNI [dihargai]? [Kita] juga punya pendekatan seperti itu [ingin membantu], tetapi mereka masih keras sekali. Seperti [sikap keras] Ustaz Yasin ini 'kan ... Ini 'kan tiga anaknya [Genda] jadi korban semua, [karena] tidak mau disekolahkan. Tidak tahu doktrinnya apa dan anaknya tidak ada yang [mau] sekolah. Padahal Pak Ramli (Bhabinkamtibmas) siap menyekolahkan tanpa bayaran apa pun, silakan ... yang penting sekolah.⁵⁶

Selain itu, SDIT Permata Islam di atas menjadi kasus menarik dari dua segi lain. Pertama terkait dengan kebijakan pemerintah setempat sehubungan dengan status Lisbeth Sangkalabu, kepala SDIT, yang juga istri Ustaz Sairin. Sebelum memimpin SDIT secara penuh, dia juga adalah seorang pegawai negeri yang bertugas mengajar Bahasa Inggris di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 di Poso Kota, karena dia seorang sarjana lulusan Jurusan Sastra Inggris dari Universitas Tadulako di Palu. Karena merasa bahwa SDIT harus diurus penuh waktu, Lisbeth mengajukan pengunduran dirinya sebagai pegawai negeri. Menariknya, pemerintah setempat menolak permintaan itu dan bahkan tetap mempertahankan statusnya itu sambil menugaskannya sebagai kepala SDIT.

Kedua, SDIT menjadi kasus menarik juga karena sebagian kalangan Muslim di Poso tetap saja mencurigai sekolah itu sebagai salah satu sumber pendidikan radikal karena aliansinya dengan yayasan di bawah asuhan Ustaz Adnan.⁵⁷ Melihat perubahan

⁵⁵ Wawancara dengan Hasanudin, 15 Maret 2019.

⁵⁶ Wawancara dengan Sairin, 2 September 2018.

⁵⁷ Butir ini muncul misalnya dalam wawancara dengan Ibrahim Ismail, 12 Maret 2019.

yang terjadi seperti sudah disinggung, masih bertahannya kesan seperti ini sangat mengherankan. Apalagi jika, dalam kasus SDIT, sejarah hidup Ustadz Sairin dan istrinya diperhatikan. Meski Lisbeth sudah merupakan seorang muallaf sebelum dia menikah dengan Ustadz Sairin, ibunya, yang hingga kini tetap seorang Nasrani, tinggal bersamanya dan keluarganya. Dan walaupun rumah keluarga ini dibakar ketika konflik kekerasan meningkat pada 2000, mereka tidak mendendam apa-apa terhadap kaum Nasrani di Poso sekarang.⁵⁸

3. Aktivisme Binadamai Lintas-Iman

Inisiatif binadamai lainnya di Poso dilakukan anak-anak muda lintas-iman, termasuk ikhwan dan mantan jihadis dan napiter. Langkah-langkah mereka, terutama dalam bidang seni dan kebudayaan, sangat penting untuk memperkokoh jembatan di antara berbagai kelompok.

Di atas sudah disinggung mengenai Komunitas Rumah Katu, yang dibentuk Iin Brur dan kawan-kawannya. Lebih jauh, komunitas ini bersifat lintas-iman, dengan beberapa aktivis Kristen dari Tentena terlibat di dalamnya. Belakangan, salah satu aktivitas besar komunitas ini adalah ikut menyiapkan dan mendampingi grup band kenamaan Slank dalam konser mereka, bertajuk “Konser Piss Poso”, di tepi Danau Poso, Tentena, pada 6 November 2017.⁵⁹ Komunitas itu juga sudah membuat beberapa film, salah satu di antaranya, dan yang mungkin bisa disebut paling penting, adalah *Jalan Pulang*,⁶⁰ yang disutradarai Iin Brur dan didasarkan atas kisahny sendiri.

Iin Brur sendiri pernah memperkenalkan filmnya di atas di Tentena, satu pusat Kristen di Poso, yang sempat kami hadiri. Waktu memberi sambutan mengenai filmnya itu, Iin Brur menyatakan: “Saya adalah salah satu korban konflik yang menghancurkan kehidupan di tanah Poso ini. Saya juga mantan napiter, narapidana teroris. [Film] ini merupakan bentuk rasa tanggung jawab saya setelah apa yang pernah saya lakukan terhadap orang lain – dan saya akan terus menyampaikan pesan-pesan perdamaian lewat media apa saja.”⁶¹ Ini terobosan penting mengingat dia adalah salah satu pelaku pemboman Pasar Tentena yang mengakibatkan 22 orang terbunuh, pada 2005. Karena reputasinya yang kini sudah bersifat nasional, bahkan internasional, banyak dukungan datang kepada Iin Brur (lihat Ali-Fauzi, 2018). Sayangnya, film yang disutradarainya kurang cukup disosialisasikan bahkan di Poso sendiri, sehingga banyak pihak belum menyaksikannya, termasuk para ikhwan dan napiter.

Langkah-langkah binadamai lintas-iman juga dilakukan Lian Gogali, aktivis perempuan yang kebetulan juga salah satu penyintas Kristen yang rumahnya terbakar

⁵⁸ Wawancara dengan Lisbeth Sangkalabu, 3 September 2018.

⁵⁹ Lihat “20 Tahun Menunggu, Impian Slank Manggung di Poso Bakal Terwujud,” *Kapanlagi.com*, 26 Oktober 2017, <https://musik.kapanlagi.com/berita/20-tahun-menunggu-impian-slank-manggung-di-poso-bakal-terwujud-7a28e0.html> (diakses 28 Oktober 2017); “Slank Gelar Konser Perdamaian untuk Poso,” *Kompas.com*, <http://entertainment.kompas.com/read/2017/10/25/165835710/slank-gelar-konser-perdamaian-untuk-poso> (diakses 28 Oktober 2017).

⁶⁰ Lihat *trailer*-nya di Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=7xhHE_YtfO4 (diakses 10 Maret 2019).

⁶¹ Dikutip dalam Ali-Fauzi, 2018: 49.

habis ketika konflik Poso berlangsung. Dia tidak berada di Poso ketika peristiwa itu terjadi, tetapi setelah kembali ke Poso pada 1999, dia melihat keluarga dan teman-temannya tinggal di tempat pengungsian dengan trauma yang mendalam.⁶² Hal ini mendorongnya membentuk Institut Mosintuwu pada 2008, bersama penyintas konflik lainnya. Kata Mosintuwu diambil dari Bahasa Pamona, sebuah suku di Poso, yang berarti “bekerja bersama-sama”.⁶³

Institut Mosintuwu sengaja mengutamakan peran perempuan dalam membangun dan menjaga perdamaian di Poso. Mereka berharap para perempuan dapat bertransformasi dari individu dengan pandangan agama yang ekstrem menjadi pembawa kedamaian dengan semangat pluralisme. Untuk mewujudkannya, lembaga ini melaksanakan berbagai program pemberdayaan perempuan, mulai dari pendidikan politik, pelatihan keterampilan kepemimpinan, perlindungan perempuan dari kekerasan, dan pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu program utama yang mereka usung adalah Sekolah Perempuan, sekolah alternatif selama satu tahun dengan berbagai topik bahasan. Hingga 2015, sudah ada 500 perempuan dari 70 desa di Kabupaten Poso dan Morowali yang menjadi alumni dari sekolah ini.

Di antara peristiwa yang dianggap makin menunjukkan meningkatnya kesadaran anak-anak muda Poso, baik Muslim atau Kristen, untuk menjaga kerukunan bersama adalah reaksi mereka menyusul kontroversi terkait *posting*-an Jemi Karter Kareba, seorang guru Kristen warga Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, menanggapi satu laporan media massa tentang penolakan kedatangan Ustaz Abdul Somad di Bali pada awal Desember 2017. Melalui akun Facebooknya, Jemi memberi komentar: “Ustaz Abdul Somad adalah Ustaz Bermazhab Salafisme dan Wahabi, Provokator di Indonesia, Mantap Saudara ku di Bali.” Karena *posting*-an itu dianggap dapat mengundang kemarahan kaum Muslim di Poso, beberapa aktivis Kristen di Tentena mencari Jemi dan hendak mempersekusinya. Hal yang sama juga dilakukan sejumlah kaum Muslim. Menariknya, mereka, para aktivis Muslim dan Kristen, kemudian melaporkan bersama-sama peristiwa ini ke Polres, sehingga masalah dapat diatasi secara damai. Pada Sabtu, 9 Desember 2017, Jemi menyerahkan diri ke Polres Poso agar masalahnya diselesaikan.⁶⁴

Terakhir, unsur-unsur pemuda lintas-agama di atas juga ikut terlibat dalam lokakarya “Melawan Hasutan Kebencian” di Poso, yang berlangsung pada 14-15 Maret 2019. Selain mereka, acara yang dikelola PUSAD Paramadina dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) ini juga dihadiri unsur-unsur kelompok kepentingan lain di Poso, seperti rektor Universitas Kristen Tentena (UNKRIT), KPU, MUI, dan Polres. Lokakarya itu bertujuan meningkatkan kapasitas peserta dalam mengenal dan menangkal hasutan kebencian, termasuk lewat media sosial. Di ujung acara, para peserta merancang agenda

⁶² Lihat TedxTalk oleh Lian Gogali, <https://www.youtube.com/watch?v=-i9unT9aZ8E> (diakses 20 April 2019).

⁶³ Lihat situs Institut Mosintuwu, <http://www.mosintuwu.com/tentang-kami/> (diakses 20 April 2019).

⁶⁴ Wawancara dengan Syahril (Ayi) Lakita, 2 September 2018. Lihat juga “Pemuda Lintas Agama di Poso Bereaksi, Penghina Islam Ini Menyerahkan Diri,” *Media Alkhairaat Online*, 11 Desember 2017, <https://media.alkhairaat.id/pemuda-lintas-agama-di-poso-bereaksi-penghina-islam-ini-menyerahkan-diri/> (diakses 11 Januari 2019).

kerja bersama, yang terus berlangsung hingga sekarang.⁶⁵

4. Keterlibatan Kaum Perempuan

Perkembangan positif lain tampak dari mulai meningkatnya keterlibatan kaum perempuan yang dikenal dekat atau terkait dengan para ikhwan atau jihadis di Poso dalam aktivisme binadamai. Salah satu contohnya ditunjukkan para istri yang bergabung dalam Kelompok Majelis Taklim (KMT) Amanah di Tanah Runtuh, yang berinisiatif mengembangkan biro usaha dan keterampilan di bidang kuliner dan menjahit. Tidak bisa diketahui dengan pasti seberapa besar pengaruh inisiatif ini, tetapi organisasi ini saja sudah beranggotakan sekitar 45 orang, dengan sepuluh orang di antaranya adalah istri napiter atau mantan napiter.

KMT ini berharap usaha mereka dapat menambah kesibukan mereka dan membantu keuangan rumah tangga mereka. Aktivitas mereka meliputi latihan menjahit dan kuliner sebagai modal dalam berusaha dan hal ini sudah dimulai sejak 2017. Di antara keduanya, kelompok menjahit lebih aktif dalam menjalankan kegiatannya. Mereka menamakan diri Rumah Jahit Muslimah (RJM) Syamela. Kelompok ini beranggotakan kurang lebih 25 orang dan diketuai oleh Umi Aminah, istri Ustaz Hasanudin yang sudah disebut di atas. Mereka sudah memiliki mesin jahit dan mesin bordir dan telah melakukan beberapa kali pelatihan.

Kelompok di atas minta dukungan kepada kenalan mereka untuk menyediakan peralatan (mesin jahit dan alat masak) dan mendapat pelatihan dari instruktur secara cuma-cuma. Pada tahun 2019 ini, mereka lebih proaktif bekerja dan meminta bantuan kepada pihak Dinas Sosial Kota Poso. Usaha ini datang setelah Ustaz Hassan mendapat tawaran bantuan dari Dinas Sosial, namun dia menyarankan agar Dinas Sosial mendukung kegiatan yang dilakukan para istri ini.

Sayangnya, upaya-upaya ini masih terbentur masalah birokrasi sehingga sulit mendapatkan bantuan. Menurut Fuad Amhar dari Dinas Sosial, belum ada skema program pemerintah yang menargetkan pemberdayaan istri para napiter. Program ini akhirnya masuk dalam jalur “Perempuan Rentan Sosial/Ekonomi”, yang mensyaratkan pengaju proposal untuk memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang tidak mampu.⁶⁶ Namun tidak semua istri atau ibu (*ummahat*) di atas memiliki dokumen ini; dan jika pun punya, dokumen itu belum tentu bisa dimanfaatkan dengan baik.

Walaupun menghadapi banyak kendala, pihak RJM Syamela tetap antusias dan mencari celah supaya bisa mendapat bantuan sambil terus melanjutkan aktivitasnya, misalnya dengan meminta dukungan Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS) untuk menyediakan instruktur yang bisa mengajarkan mereka. Mereka juga kerap mengumpulkan uang kas untuk operasional sehari-hari.⁶⁷

Aktivitas-aktivitas yang diinisiasi kaum perempuan seperti ini perlu dukungan

⁶⁵ Kami, ketiga penulis laporan ini, terlibat dalam acara ini sebagai bagian dari PUSAD Paramadina.

⁶⁶ Wawancara dengan Fuad Amhar, 9 Januari 2019.

⁶⁷ Wawancara dengan Umi Aminah, 15 Maret 2019.

pemerintah agar bisa terus berjalan dan berkembang untuk Poso yang lebih damai. Berdasarkan wawancara kami, sejauh ini belum pernah ada perhatian khusus dari pemerintah untuk lebih melibatkan istri atau janda napiter sebagai bagian dari proses deradikalisasi atau *disengagement*. Di awal penanganan kasus terorisme memang pernah dilakukan pendekatan lunak atau *soft approach* kepada keluarga napiter dengan memberikan uang sebesar lima juta rupiah (Schulze, 2008; Istiqomah, 2011). Namun bantuan tersebut lebih merupakan strategi untuk merebut hati dan kepercayaan pihak laki-laki (napiter), tanpa maksud yang serius untuk memberdayakan para istri atau janda mereka.

VI. PENUTUP: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Laporan ini ditulis berdasarkan riset yang ingin menjawab pertanyaan apakah masyarakat Poso belakangan ini mengalami reradikalisasi, mengingat konflik kekerasan komunal Muslim-Kristen yang berlangsung 20 tahun lalu dan masih bertahannya kelompok MIT pimpinan Santoso di wilayah itu. Riset ini juga ingin melihat sejauh mana rekonsiliasi di antara dua komunitas di atas sudah berlangsung selama ini. Akhirnya, riset ini juga mau melihat inisiatif-inisiatif binadamai yang sudah dilakukan berbagai pihak di Poso dan diharapkan membawa hasil yang lebih berbekas dalam jangka panjang.

Kami menarik tiga kesimpulan pokok dari riset ini. Ketiganya terkait dengan reradikalisasi, rekonsiliasi, dan langkah-langkah binadamai.

Pertama, tumbuh dan bertahannya kelompok MIT di Poso belakangan ini bukan merupakan bukti bahwa komunitas Muslim dan Kristen di Poso sedang mengalami reradikalisasi. Fenomena terakhir MIT di Poso adalah dampak berubahnya konflik di wilayah itu dari konflik komunal Muslim-Kristen (1998-2002) menjadi aksi-aksi teror sporadis pihak-pihak Muslim tertentu yang tidak puas terhadap kesepakatan damai Malino (Desember 2001), yang sebagiannya dipengaruhi “guru-guru dari Jawa” dalam jaringan JI, yang kemudian berkembang menjadi kekerasan terorisme yang lebih terorganisasi. Tetapi dukungan masyarakat Muslim Poso kepada kelompok-kelompok teroris terakhir ini sangat kecil, dan dukungan itu diberikan lebih karena alasan kemanusiaan dan bukan ideologis. Komunitas Muslim Poso pada umumnya kini berpandangan bahwa situasi sekarang sudah sangat berbeda dibanding dulu, bahwa konflik kekerasan yang pernah terjadi hanya mendatangkan kerugian, dan bahwa kini tidak ada alasan untuk mendukung kelompok-kelompok seperti MIT. Pandangan seperti ini juga dipegang pada umumnya ikhwan dan jihadis setempat, yang dulu menjadi pilar aksi-aksi kekerasan: kini mereka bahkan ikut mendukung proses-proses politik yang normal, seperti Pemilu 2019, dan sikap mereka didukung oleh kelompok-kelompok perempuan (ibu, istri atau janda) yang makin berperan dalam mencegah reradikalisasi.

Perkembangan di atas menjadi latar belakang mengapa kelompok teroris MIT beroperasi di wilayah pegunungan di pinggiran wilayah Poso, bukan di jantungnya, dan kekuatan mereka belakangan makin lemah dengan para pengikut baru bukan berasal dari Poso. Di luar itu, kelompok teroris ini terus digempur oleh operasi keamanan yang khusus dibentuk untuk melumpuhkan mereka. Namun, meskipun makin tersudutkan, kelompok MIT tetap dapat menyatakan posisi dan seruan mereka terkait isu-isu seperti lahirnya

ISIS di Suriah lewat media sosial, sambil sesekali melakukan operasi, yang menunjukkan bahwa mereka masih eksis dan berpengaruh.

Kedua, jika masih ada dukungan ideologis kepada kelompok teroris MIT di Poso, maka sisa-sisa dukungan itu terkonsentrasi pada kelompok di sekitar Ustaz Yasin di Kayamanya dan pesantren yang dipimpinnya di Malino, yang memang sejak semula ikut membangun kelompok MIT bersama Santoso. Kelompok inilah yang terus mewarisi cita-cita pembentukan kekhalifahan Islam dari Poso, seraya menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dianggap mencerminkan ketundukan kepada sistem yang bukan buatan Tuhan (*thoghut*), dan membolehkan – bahkan mengharuskan – penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan.

Sayangnya, di antara kelompok rentan yang potensial dipengaruhi ideologi ekstremis di atas adalah generasi muda Poso yang sebenarnya tidak langsung terlibat dalam konflik komunal Muslim-Kristen sekitar 20 tahun lalu. Generasi muda ini, yang baru lahir atau berusia sekitar sepuluh tahun ketika konflik komunal terjadi, belakangan mewarisi narasi mengenai konflik kekerasan dan ketidakadilan yang menimpa keluarga mereka dari orangtua dan sanak famili mereka, sebagiannya kelompok-kelompok perempuan yang terhubung dengan kasus-kasus terorisme, yang bisa membangkitkan perasaan marah dan dendam. Pada gilirannya, rasa dendam dan marah akibat masa lalu konflik itulah yang menjadi ladang subur bagi penerimaan atas ideologi Islam radikal atau ekstremis. Inilah perkembangan terakhir paling memprihatinkan di Poso, khususnya di Poso Pesisir, yang lebih dekat ke wilayah beroperasinya MIT belakangan ini.

Perkembangan di atas juga menandakan bahwa reintegrasi masyarakat Poso pascakonflik belum berlangsung penuh. Di sini, reintegrasi sebenarnya harus terjadi bukan hanya di antara komunitas Muslim dan Kristen di Poso, yang menjadi aktor-aktor utama dalam tahap awal konflik komunal, melainkan juga di antara sebagian masyarakat Muslim Poso yang tidak puas terhadap perjanjian damai Malino dengan pemerintah atau NKRI yang dulu mereka benci dan perangi. Bantuan ekonomi dalam rangka reintegrasi dari segi ini sangat kurang dari memadai, karena penyalurannya belum terkoordinasi dengan baik terlepas dari besarnya, dan dalam beberapa kasus bahkan menimbulkan kecemburuan. Banyak dukungan kepada kelompok teroris MIT beberapa tahun terakhir datang dari mereka yang rentan secara ekonomi seperti ini, yang menjadikan mereka mudah dipengaruhi oleh ideologi Islam ekstremis, meskipun usia mereka masih terhitung muda.

Akhirnya, *ketiga*, di tengah berbagai keterbatasan yang ada, beberapa langkah binadamai berlangsung menjanjikan di Poso dengan dampak jangka panjang yang penting. Empat di antaranya berlangsung di sektor-sektor berikut: (1) pemolisian yang makin sadar akan tantangan ekstremisme kekerasan di Poso dan makin sigap menghadapinya, termasuk dalam menghadapi mantan napiter atau napiter yang baru akan keluar dari penjara; (2) pendidikan (dan dakwah) Islam yang makin terbuka dan moderat; (3) aktivisme lintas-agama anak-anak muda yang makin membuka ruang-ruang perjumpaan di antara berbagai kelompok masyarakat; dan (4) tumbuhnya inisiatif kelompok-kelompok perempuan sebagai pilar perdamaian dalam jangka panjang. Sayangnya, langkah-langkah di atas

masih kurang memperoleh dukungan seperti yang seharusnya diterima.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, di bawah ini kami kemukakan beberapa rekomendasi menurut topik-topik tertentu yang menonjol:

1. Sisa-sisa kelompok MIT

Pemerintah Indonesia harus segera menuntaskan operasi-operasi keamanan terhadap sisa-sisa kelompok MIT di Poso yang belakangan makin terpojok karena para pemimpinnya sudah berhasil dilumpuhkan dan jumlah pengikutnya makin berkurang. Berlarut-larutnya operasi keamanan di atas akan memakan biaya yang sangat besar, bukan saja dari segi pendanaan (finansial), tetapi juga dari segi korban manusia yang bisa diakibatkannya, termasuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia (HAM). Lebih jauh, hal itu juga dapat mempertebal kecurigaan beberapa pihak bahwa operasi-operasi itu hanya alasan yang dibuat-buat untuk memperbesar tugas, mandat dan akhirnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk kepentingan sektor-sektor keamanan. Akhirnya, hal ini juga dapat memperkuat dugaan, bahkan teori konspirasi, yang cukup luas beredar bahwa terorisme sebenarnya tidak pernah ada di Indonesia.

Terkait butir di atas, langkah-langkah perbaikan harus memperhatikan tiga prinsip di bawah:

- a. **Transparansi dan akuntabilitas:** Pemerintah harus memberi informasi selengkap dan sejelas mungkin tentang operasi keamanan yang sedang dan akan dijalankan. Pemerintah juga harus memberi pertanggungjawaban periodik terkait operasi keamanan yang berlangsung, dengan menjelaskan mengapa misalnya sebuah operasi keamanan belum kunjung berhasil dan harus diperpanjang, padahal target yang diburu makin terkucil dan dukungan kepada mereka makin merosot.
- b. **Penegakan hukum yang menghormati HAM:** Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak lain yang berkepentingan harus memastikan bahwa langkah-langkah penegakan hukum yang dijalankan dalam rangka kontraradikalisme atau kontraterorisme tetap berada dalam koridor yang menghormati prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Dalam hal ini, keterlibatan lembaga-lembaga HAM dalam memantau berjalannya berbagai kegiatan kontraradikalisme atau kontraterorisme oleh pemerintah harus diizinkan.
- c. **Penguatan rekonsiliasi:** Pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan harus terus memperkuat rekonsiliasi di antara beragam segmen masyarakat di Poso. Hal ini penting karena kemunculan kelompok teror di Poso bagaimana pun tidak bisa dilepaskan dari sejarah konflik sebelumnya. Kekecewaan terhadap penyelesaian konflik sebelumnya sering kali dijadikan alasan oleh kelompok tertentu untuk melakukan aksi-aksi kekerasan. Karena itu, bingkai dan analisis konflik yang menyeluruh tetap diperlukan untuk mengidentifikasi sebab-sebab konflik yang boleh jadi memerlukan pendekatan berbeda dan di luar penegakan hukum. Menimpakan semua sumber masalah pada kelompok teror dan melupakan aktor dan masalah lain yang saling terkait tidak akan melahirkan penyelesaian yang berkesinambungan.

2. Dukungan ideologis kepada kelompok teroris MIT

Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak lain yang berkepentingan harus terus mengawasi dan menangkal peredaran sisa-sisa ideologi radikal dan ekstremis di Poso. Namun, upaya ini jangan sampai berdampak makin mengucilkan kelompok-kelompok di atas dari masyarakat yang lebih luas karena hal itu justru akan makin menyuburkan ideologi yang radikal, ekstremis, dan anti-sistem.

Terkait butir di atas, langkah-langkah perbaikan harus memperhatikan tiga prinsip berikut:

- a. Mendorong partisipasi dan membangun jembatan: Pemerintah dan masyarakat harus membangun jembatan dengan kelompok-kelompok di atas, seperti yang selama ini dilakukan misalnya oleh Polres Poso, dan mengidentifikasi masalah-masalah dan saluran-saluran yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam kehidupan publik yang damai, tanpa harus bergerilya atau menggunakan kekerasan. Meskipun pengikut potensial kelompok seperti di atas cukup besar di Poso, faktanya tidak banyak di antara mereka yang melangkah lebih lanjut untuk bergabung dengan kelompok-kelompok teror. Artinya, lingkungan radikal seperti ini tidak hanya membuka jalan bagi seseorang untuk bergabung dengan kelompok teror, tetapi juga memberi ruang yang, karena satu dan lain hal, dapat menampung mereka yang tidak ingin bergabung dengan atau ingin meninggalkan kelompok teror.
- b. Memperkuat inklusi: Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak lain yang berkepentingan harus memperkuat lembaga-lembaga pendidikan (dan dakwah) Islam yang kini makin terbuka dan moderat di Poso, misalnya dengan membantu kelancaran operasinya dan memasukkan sebanyak mungkin anak-anak kelompok rentan di Poso untuk dididik di sana. Mengingat perubahan yang terjadi sejauh ini pada diri mereka, memojokkan mereka adalah pendekatan yang salah dan kontraproduktif.
- c. Memperbanyak ruang pertemuan: Pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan harus memperbanyak forum-forum di mana berbagai sektor masyarakat Poso, termasuk pemuda dan mahasiswa, bisa saling berjumpa dan berdialog. Ini bukan hanya di antara komunitas Muslim dan Kristen, tetapi juga di antara satu dan lain kelompok Muslim. Pertemuan di forum-forum itu akan meningkatkan kesalingpahaman di antara mereka.

3. Bantuan ekonomi dalam rangka reintegrasi

Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak yang berkepentingan lain harus memperbaiki koordinasi, strategi, dan sasaran penyaluran bantuan ekonomi dalam rangka reintegrasi masyarakat Poso. Asumsi-asumsi yang simplistis mengenai hubungan antara bantuan dan deradikalisasi harus dihindari. Jangan sampai bantuan memberikan insentif bagi orang lain untuk ikut-ikutan melakukan aksi kekerasan agar mendapatkan bantuan yang sama, atau menimbulkan kecemburuan dan konflik baru.

Terkait butir di atas, langkah-langkah perbaikan harus mempertimbangkan empat prinsip berikut ini:

- a. Koordinasi dan transparansi: Pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan harus memastikan bahwa penyaluran bantuan dikoordinasikan dengan baik. Banyak kelemahan dalam penyaluran bantuan bermula dari ketiadaan koordinasi ini. Koordinasi yang baik juga memungkinkan bantuan yang berorientasi pada kemandirian dan kerja sama. Koordinasi pada gilirannya juga harus ditunjang oleh pengelolaan bantuan secara transparan sehingga publik dapat mengontrol bagaimana bantuan dikelola.
- b. Basis data yang terintegrasi: Pemerintah Indonesia harus menyediakan basis data yang terintegrasi terkait bantuan. Seringkali koordinasi tidak berjalan karena tidak ada pengetahuan atau informasi tentang berbagai macam bantuan baik antara pemerintah pusat dan daerah atau antar-sektor. Pusat data dan informasi terkait bantuan terhadap napiter akan membantu menyusun strategi dan pola penyaluran yang adil, sesuai dengan kebutuhan, dan berjangka panjang. Data yang terintegrasi juga bisa membantu semua pihak untuk memantau sejauh mana efektifitas bantuan, selain memastikan transparansi sumber dana dan kepada siapa bantuan disampaikan.
- c. Membangun kemandirian, bukan sekadar pengawasan: Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak lain yang berkepentingan harus memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak dimaksudkan untuk meraih kepentingan sesaat saja, seperti memastikan loyalitas mantan napiter dan keluarga mereka atau mengumpulkan informasi dari mereka, melainkan untuk menumbuhkan kapasitas dan kemandirian mereka yang bermanfaat dalam jangka panjang.
- d. Kelompok rentan sebagai sasaran bantuan: Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak lain yang berkepentingan harus memastikan bahwa bantuan diberikan tidak hanya kepada napiter atau mantan napiter, atau keluarga mereka saja, tetapi juga kepada kelompok dan masyarakat rentan yang tidak terlibat langsung dalam konflik kekerasan tetapi terkena dampaknya. Beberapa tahun terakhir, dukungan kepada kelompok MIT datang dari kelompok rentan ini.

4. Peran strategis perempuan

Pemerintah Indonesia dan semua pihak yang berkepentingan harus mulai mengakui peran strategis kaum perempuan baik dalam mendorong maupun menghambat radikalisasi atau reradikalisasi suami, anak atau sanak famili mereka. Peran strategis ini melekat pada kelompok perempuan karena dampak negatif yang langsung atau tidak langsung mereka rasakan akibat konflik kekerasan sebagai ibu, istri atau janda.

Terkait butir di atas, langkah-langkah perbaikan harus mempertimbangkan dua prinsip berikut ini:

- a. Perkuat posisi perempuan rentan: Pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan harus mulai merangkul para istri atau janda napiter dan

terduga teroris yang ditembak mati, terutama mereka yang tidak terlibat dalam jaringan jihad seperti kebanyakan perempuan di Poso. Bantuan dapat berupa pendampingan psikologis, penyuluhan keterampilan *soft skills* maupun *hard skills*, dan pemberdayaan ekonomi.

- b. Perkuat kerjasama dan transparansi: Pemerintah Indonesia dan semua pihak yang berkepentingan harus mendukung berbagai inisiatif perempuan lokal yang sudah mulai berkembang, seperti terlihat dalam aktivitas kelompok RJM Syamela. Dalam hal ini, pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan harus bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang selama ini sudah banyak bekerja dalam program penyaluran bantuan. Selain dapat memperkuat akuntabilitas, kerjasama ini akan makin memperkuat hubungan di antara berbagai segmen masyarakat.

5. Upaya binadamai yang berkesinambungan

Semua pihak yang bekerja di berbagai lini (keamanan, kontraradikalisme, kontraterorisme, bantuan, pemberantasan korupsi, perlindungan HAM, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, perempuan, pemuda, pembangunan ekonomi, demokratisasi, dan lainnya) harus memikirkan bagaimana agar inisiatif-inisiatif mereka dapat berkontribusi terhadap upaya binadamai yang berkesinambungan. Fokus masing-masing pihak harus disinergikan dengan strategi binadamai yang koheren dan berjangka panjang yang diterima dan dipahami bersama oleh berbagai aktor. Dukungan-dukungan di masa depan harus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kerja sama dan kesalingpahaman di antara aktor-aktor tersebut.

Jakarta, Mei 2019

BIBLIOGRAFI

- Ali-Fauzi, Ihsan. 2018. “‘Jalan Pulang’ menurut Mantan Teroris Jihadis: Kekerasan dan Binadamai di Poso, Sulawesi Tengah.” Dalam Ihsan Ali-Fauzi dan Dyah Ayu Kartika (eds.), *Keluar dari Ekstremisme: Delapan Kisah “Hijrah” dari Kekerasan Menuju Binadamai*, hal. 49-75. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.
- Aragon, Lorraine. 2001. “Communal Violence in Poso, Central Sulawesi: Where People Eat Fish and Fish Eat People.” *Indonesia* 71: 45-79.
- Braithwaite, John, Valerie Braithwaite, Michael Cookson, and Leah Dunn. 2010. *Anomie and Violence: Non-truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding*. Canberra: Australian National University (ANU) Press.
- Hwang, Julie Chernov. 2018. *Why Terrorists Quit: The Disengagement of Indonesian Jihadists*. New York: Cornell University Press.
- Hwang, Julie Chernov, Rizal Panggabean, and Ihsan Ali-Fauzi. 2013. “The Disengagement of Jihadis in Poso, Indonesia.” *Asian Survey* 53: 754-777.
- Human Rights Watch (HRW). 2002. *Breakdown: Four Years of Communal Violence in Central Sulawesi*. Human Rights Watch (December 4), available at <https://www.hrw.org/report/2002/12/04/breakdown/fouryears-communal-violence-central-sulawesi>.
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2016a. *Disunity among Indonesian ISIS Supporters and the Risk of More Violence*. IPAC Report No. 25 (1 February).
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2016b. *Update on Indonesian Pro-ISIS Prisoners and Deradicalisation Efforts*. IPAC Report No. 34 (14 December).
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2017. *The Re-emergence of Jemaah Islamiyah*. IPAC Report No. 36 (27 April).
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2018. *Recent and Planned Releases of Indonesian Extremists: An Update*. IPAC Report No. 49 (10 August).
- International Crisis Group (ICG). 2004. *Jihad in Central Sulawesi*. Asia Report, No. 74 (3 February).
- International Crisis Group (ICG). *Jihadism in Indonesia: Poso on the Edge*. Asia Report, No. 127 (24 January).
- International Crisis Group (ICG). *Indonesia: Jihadi Surprise in Aceh*. Asia Report No. 189 (20 April).
- International Crisis Group (ICG). *Indonesia: How Indonesian Extremists Regroup*. Asia Report No. 228 (16 July).
- Istiqomah. 2011. *Deradicalization Program in Indonesian Prisons: Reformation on The Correctional Institution*. Malang, East Java: University of Brawijaya.
- Jones, Sidney. 2013. “Poso’s Jihadist Network.” *Jane’s Terrorism & Insurgency Monitor* (February).
- Karnavian, M. Tito. 2009. *Indonesia Top Secret: Membongkar Konflik Poso*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
- McRae, Dave. 2009. *DDR and Localized Violent Conflict: Evaluating Combatant Reintegration Programs in Poso, Indonesia*. Indonesian Social Development Paper No. 14 (October). Jakarta: World Bank.
- McRae, Dave. *Poso: Sejarah Komprehensif Konflik Kekerasan Antar Agama Terpanjang*

- di Indonesia Pasca Reformasi*. Diterjemahkan oleh Muhamad Haripin. Jakarta: Margin Kiri.
- Schirch, Lisa. 2004. *Little Book of Strategic Peacebuilding: A Vision And Framework For Peace With Justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- Schulze, Kristen. 2008. "Indonesia's Approach to Jihadist Deradicalization. *CTC Sentinel* (1): 8 (July).
- van Klinken, Gerry. 2007. *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. London: Routledge.

Apendiks I

TENTANG LAPORAN INI

Update Laporan

Laporan ini ditulis pada awal Maret 2019 hingga akhir April 2019, sebelum Pemilu 2019, berdasarkan data-data yang dikumpulkan hingga Februari 2019. Versi terakhir laporan ini tidak diubah berdasarkan hasil Pemilu 2019.

Ucapan Terimakasih

PUSAD Paramadina ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang disebutkan di bawah ini. Tanpa dukungan dan bantuan mereka, riset dan penulisan laporan ini tidak akan pernah bisa dilakukan.

1. Para narasumber di Poso, Palu dan Jakarta, yang sudah bersedia menjawab berbagai pertanyaan kami, yang kadang terkait dengan masalah-masalah peka. Semoga laporan ini memenuhi harapan mereka.
2. Rekan-rekan mitra lokal kami, yang membantu kami melakukan wawancara dan observasi lapangan: Yono (Sumiyono), Budiman Maliki, Arifudin Lako (Iin Brur), dan Adriany Badrah. Lebih dari sekadar mitra lokal, mereka juga adalah narasumber kami yang penting.
3. Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), yang mendanai dan memastikan agar riset dan laporan ini berjalan lancar dan tepat waktu.

Apendiks II

DAFTAR NARASUMBER

Catatan: Nama-nama narasumber yang disebut di bawah ini ditulis sesuai dengan nama aslinya, kecuali beberapa yang disebutkan lain dan diberi tanda khusus (*), sesuai kesepakatan kami dengan mereka. Keterangan singkat mengenai mereka hanya menyebutkan posisi dan peran mereka terkait tema riset ini. Seluruh wawancara dilakukan ketiga penulis laporan ini, yang mewakili tim peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.

No.	Nama	Keterangan
1.	Abu Rahman*	Seorang tokoh masyarakat di Poso
2.	Andi Cakra	IpdA (Inspektur Polisi Dua); Kanit Binmas Poso Pesisir
3.	Arifudin Lako (Iin Brur)	Mantan ikhwan dan jihadis Tanah Runtuh; mantan napiter; pendiri Komunitas Rumah Katu
4.	Arsyad Ma'ling	Iptu (Inspektur Polisi Satu); Kapolsek Poso Pesisir
5.	Budi Abdillah	Ikhwan dari Tanah Runtuh; Sekretaris Lurah di Kelurahan Tawongan, Poso Kota Utara
6.	Budiman Maliki	Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Poso; aktivis LSM senior di Poso
7.	Didit	Ikhwan, KOMPAK-Kayamanya
8.	Emil	Ikhwan, KOMPAK-Kayamanya
9.	Faisal (Ical)	Ikhwan, aktivis politik Partai Nasdem
10.	Fuad Amhar	Kabid Rehabilitasi Sosial, Pemerintahan Kota Poso
11.	Gede Swara	Kompol (Komisaris Polisi); Wakapolres Poso
12.	Hasanuddin	Mantan jihadis dan napiter; pada Oktober 2002, kader JI kelahiran Semarang itu ditunjuk JI memimpin operasi JI di Poso; menantu Ustad Adnan Aarsal.
13.	Ibrahim Ismail	Sekretaris Komisariat Daerah (Komda) Alkhairaat Poso, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris MUI Poso dan Wakil Ketua FKUB Poso
14.	Icup	Ikhwan, aktivis Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
15.	Kiki (Brer)	Ikhwan, aktivis Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
16.	Lisbeth Sangkalabu	Pegawai negeri ditugaskan sebagai kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Permata Islam, Tabalo, Poso Pesisir
17.	Ma'mur Lapido	Ikhwan dan mantan napiter, calon anggota legislatif daerah dari Partai Golongan Karya (Golkar) pada Pemilu 2019
18.	Mahmudin Jamal	Kepala Badan Kesbangpol Poso
19.	Mahdin	Ikhwan, aktivis partai Golongan Karya (Golkar)
20.	Mama Ete	Ibu Arifudin Lako atau Iin Brur
21.	Mansur Masloman	Iptu (Inspektur Polisi Satu); Kasat Binmas Polres Poso
22.	Moh. Saiful	Bripka (Brigadir Polisi Kepala); Bhabinkamtibmas Kayamanya Sentral

23.	Muhammad Adnan Arsal	Seorang ustad kharismatis dan pemimpin masyarakat Muslim Poso; pengelola Yayasan Amanatul Ummah
24.	Muhamad Fauzan Adnan	Ikhwan, anak Ustad Adnan Arsal, calon anggota legislatif daerah dari Partai Gerindra pada Pemilu 2019
25.	Muhammad Sambara	Kepala Dusun Tamanjeka, Poso Pesisir
26.	Mulyadi	Mantan napiter dalam kasus dukungan kepada MIT; penerima bantuan Kapolres Poso
27.	Ramdhan (Andang)	Mantan napiter dalam kasus dukungan kepada MIT; penerima bantuan Kapolres Poso
28.	Ramlin	Brigadir (Brigadir Polisi); Bhabinkamtibmas Tabalo, Poso Pesisir
29.	Roby Utomo	AKP (Ajun Komisaris Polisi); Kapolsek Poso Kota
30.	Sairin	Ustad di Kabalu, Poso Pesisir; pendiri Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Permata
31.	Samsuyadi	Wartawan Senior Poso Pos
32.	Siti	Anggota Taklim Yayasan Amanah, Tanah Runtuh
33.	Sofyan Djumpaiw	Ikhwan, salah seorang pemimpin Mujahidin KOMPAK-Kayamanya; kini berbisnis
34.	Sutaryo	Pengurus Pesantren Wali Songo, Kilometer 9
35.	Syahril (Ayi) Lakita	Ikhwan; aktivis Komunitas Rumah Katu
36.	Umi Aminah	Koordinator Rumah Jahit Muslimah (RJM) Syamela; istri Ust Hassanudin; anak dari Ustad Adnan Arsal
37.	Umi Ati*	Istri Iwan Hartono, seorang mantan napiter
38.	Umi Dewi*	Istri Basri alias Bagong, pengganti Santoso sebagai pemimpin MIT yang kini dipenjara
39.	Umi Hayati*	Istri Arfan, terduga teroris yang ditembak mati pada Mei 2014
40.	Umi Hesti*	Istri Genda (Imron), napiter dalam kasus dukungan kepada MIT
41.	Umi Sari*	Istri Ramdhan atau Andang, mantan napiter dalam kasus dukungan kepada MIT dan penerima bantuan Kapolres Poso
42.	Umi Susi*	Istri pelaku bom GOR Poso tahun 2007
43.	Umi Teti*	Istri Ambo Intan, seorang napiter
44.	Yono (Sumiyono)	Mantan anggota Mujahidin Tanah Runtuh, tidak pernah dipenjara; kini pengurus Partai Berkarya, Poso
45.	Yusuf Runa	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Poso